

**PERSEPSI AKTIVIS MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUSKA RIAU TERHADAP DEMONSTRASI DALAM
MENYAMPAIKAN PENDAPAT MENURUT
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI)



OLEH :

ABDUSSALAM

NIM : 10424026134

**PROGRAM S1
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2009**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Persepsi Aktivis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Suska Riau Terhadap Demonstrasi dalam Menyampaikan Pendapat Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*”. Skripsi ditulis berdasarkan latar belakang dari perjalanan demonstrasi yang terjadi dalam demokrasi Indonesia, sehingga secara umum akan diketahui bagaimana Persepsi Aktivis Mahasiswa terhadap demonstrasi terutama Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN Suska Riau.

Demonstrasi merupakan salah satu hak yang termasuk dalam bagian hak kebebasan berpendapat yang dimiliki manusia semenjak lahir, di dalam hak kebebasan berpendapat tersebut juga terdapat berbagai macam hak azasi seperti hak untuk menyampaikan pendapat berupa saran, kritikan, pendapat dan lain sebagainya. Dan hak kebebasan tersebut merupakan hak azasi manusia yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, ketika hak tersebut terampas maka akan timbul gejolak dari mereka yang merasa terampas haknya termasuk mereka yang aktif dalam mengontrol kebijakan.

Gelar mahasiswa sebagai *the age of control* atau pengontrol kebijakan pemerintah akhir-akhir ini tidak lagi sesuai bila dibandingkan dengan minat mahasiswa yang tergabung di dalam aksi demonstrasi atau dengan kata lain mahasiswa sekarang lebih cenderung bersikap diam dari pada tergabung di dalam gerakan moral berupa demonstrasi. Hal ini bisa dilihat ketika demonstrasi dilakukan mahasiswa UIN Suska Riau dari berbagai organisasi yang ada, maka terlihat hanya belasan saja mahasiswa yang tergabung didalamnya. Apalagi sekarang hampir tidak terdengar dikampus UIN ini suara-suara lantang dalam bentuk orasi yang dilakukan mahasiswa.

Minimnya peminat mahasiswa UIN Suska Riau dalam menyampaikan pendapat melalui demonstrasi tentunya akan mendapatkan persepsi tersendiri bagi mahasiswa terutama mahasiswa UIN Suska Riau.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih jauh mengenai Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN Suska Riau serta pemahaman mereka terhadap demonstrasi sebagai manifestasi dari hak kebebasan berpendapat dalam menyalurkan aspirasi, kritik, pandangan dan sebagainya.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengumpulkan data dengan penelitian lapangan yaitu dengan menyebarkan angket dan melakukan wawancara terhadap mahasiswa yang sering terlibat dalam aksi demonstrasi, selanjutnya penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan mengenai masalah yang ada korelasinya dalam penelitian ini.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
TABEL	viii
ABSTRAK	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Pokok Permasalahan.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : TINJAUAN TENTANG LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat UIN Suska Riau.....	12
B. VISI, MISI dan Karakteristik UIN Suska Riau.....	15
C. Tujuan Pendidikan	17
D. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).....	20
BAB III : TINJAUAN UMUM DEMONSTRASI DI DUNIA DEMOKRASI	
A. Pengertian.....	22
B. Sejarah Demonstrasi di Indonesia.....	26
C. Demonstrasi Menurut Islam.....	31
BAB IV : PERSEPSI AKTIVIS MAHASISWA UIN TERHADAP DEMONSTRASI	
A. Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN	42
B. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.....	53

C. Perspektif Fiqh Siyasah.....	58
---------------------------------	----

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran.....	64

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara historis, permasalahan yang diperselisihkan pada hari pertama setelah wafatnya Rasulullah Saw adalah persoalan politik atau yang disebut dengan *imamat*.¹

Permasalahan di atas merupakan permasalahan yang bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan setiap saat. Hal tersebut timbul tidak hanya terfokus kepada pemilihan dan pengangkatan pemimpin, tetapi juga pada gejolak-gejolak yang muncul pada saat atau selama pemimpin tersebut berkuasa.²

Rakyat sebagai komunitas yang dipimpin akan selalu melihat kebijakan – kebijakan yang diimplementasikan oleh imam atau pemimpin tersebut, karena rakyat adalah target atau sasaran dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah atau pemimpin itu sendiri. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi atau lebih tepatnya negara yang menjunjung tinggi kepentingan rakyat, mesti berpedoman kepada suara rakyat dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Di sinilah rakyat sangat berperan aktif dalam menyuarakan aspirasi atau yang disebut juga dengan *The Controler*.³

¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta : UI Press, 1978), Cet 1 hal 92

² Muhammad Rum, *Strategi Perang Salib*, Majalah SABILI (Jakarta, Edisi No. 14 Th. X130 Januari 2004) hal. 31

³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Negara*, terj. Syafril Halim (Jakarta ; Rabbani Press. 1997) cet 4 hal. 114

Istilah demokrasi berasal dari kata *Demos* (rakyat) dan *Kratien* atau *Kratos* (Kekuasaan). Kekuasaan negara dianggap bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyatlah penentu akhir dari penyelenggaraan dari suatu negara. Oleh karenanya pemerintah tidak boleh memaksakan kehendak kepada rakyat, jika hal ini dilakukan, maka akan menimbulkan perlawanan dari rakyat baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan dimuka umum.

Di zaman modern, kata demokrasi secara luas dianggap sebagai konsep yang diidealkan oleh semua negara di dunia. Para ahli menyatakan bahwa sistem demokrasi ini dianggap yang paling baik diantara semua yang buruk. Itu sebabnya mayoritas negara di dunia mengklaim penganut paham demokrasi, meskipun dalam praktek penerapannya, tergantung kepada penapsiran masing-masing negara dan para penguasa di negara-negara yang menyebut dirinya demokrasi.⁴

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah salah satu hak –hak asasi manusia (HAM). Ia merupakan hak kemerdekaan dasar yang dimiliki setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia yang harus mendapat jaminan hukum dari negara.⁵ Di Indonesia sendiri, kemerdekaan berpendapat merupakan perwujudan dari sila ke-4 Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan”. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 menegaskan bahwa “ kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan

⁴ Sebastian Salang, dkk. *Rumah Aspirasi*, (Jakarta; KPRA-DPD RI, 2007) hal. 13

⁵ Abdussalam, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum* (Jakarta; Restu Agung, 2006) cet. 1 hal. 1

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.⁶

Selama Pemerintahan Presiden RI Soekarno sampai Presiden RI Soeharto, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut belum pernah terealisasi dalam bentuk Undang-Undang. Bagi warga negara dan masyarakat yang menggunakan kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, tidak mendapat jaminan dan perlindungan hukum atau Undang-Undang. Bahkan pemerintah atau penguasa melakukan penyelewengan kekuasaan dan penyalahgunaan kebebasan dengan mengekang dan mengendalikan dengan ketat. Jika ada warga negara dan masyarakat menyampaikan pendapat atau menyalurkan aspirasi dimuka umum walaupun dilakukan dengan tertib, maka pemerintah mengambil tindakan tegas melalui proses hukum maupun tanpa proses hukum.⁷

Kemudian pada masa pemerintahan Presiden RI B.J. Habibie terjadi perubahan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, yaitu pada tanggal 26 Mei 1998, telah disetujui bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum berkumpul dan berserikat dilepas, dengan lahirnya Peraturan Perundangan (PERPU) No. 2 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat dimuka umum.

Dengan diberikannya kemerdekaan tersebut, maka rakyat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat di muka umum melalui demonstrasi, bahkan semakin maraknya unjukrasa atau demonstrasi hampir diseluruh daerah di Indonesia tidak

⁶ *Ibid.* hal 36

⁷ *Ibid.* hal. 70-71

terelakkan lagi, bahkan meningkat menjadi kerusakan massa yang diikuti dengan tidak kriminal dan perlawanan terhadap aparat keamanan yang melakukan tindakan penegakan hukum dan bahkan bisa mengancam stabilitas politik, ekonomi, social dan keagamaan.⁸

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan fikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.⁹

Kebebasan berpendapat adalah kemerdekaan untuk menyampaikan buah pikiran atau anggapan-anggapan ataupun perkiraan-perkiraan¹⁰, disebut juga dengan *Deloverence*¹¹. Sedangkan hak kritik rakyat adalah wewenang rakyat untuk menyampaikan pendapat atau kecaman dan penilaian tentang baik buruknya suatu pendapat, hasil karya dan sebagainya¹².

Penulis melihat antara kebebasan berpendapat dan hak kritik rakyat merupakan suatu ungkapan yang berbeda tetapi tendensi kedua ungkapan tersebut sama yaitu menyampaikan buah pikiran apakah itu nasehat, aspirasi, saran atau kecaman maupun penilaian-penilaian terhadap suatu kebijakan, dalam hal ini kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

⁸ *Ibid.* hal. 77

⁹ *Ibid.* hal.26

¹⁰ Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer*, (Jakarta : modern English prees, 1991), cet.I. h. 162 dan 317

¹¹ . Wojo Wasito & Tito Wasito,W, *KamusLengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*,(Bandung: Penerbit HASTA, 1980), Cet. X. h. 43

¹² Peter Salim & Yenny Salim, *op cit*, hal. 499 dan 778

Dalam menyampaikan pendapat, ada banyak cara atau mekanisme yang bisa dilakukan, diantaranya adalah dengan menggunakan media massa, organisasi kemasyarakatan, partai politik, wakil rakyat dan demonstrasi.

Demonstrasi merupakan salah satu cara yang sering ditempuh oleh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kecaman dan lain sebagainya terhadap pemerintah yang berkuasa. Para pelaku atau yang sering memelopori gerakan demonstrasi terhadap pemerintah adalah dari kalangan pelajar atau mahasiswa, termasuk mahasiswa UIN Suska Riau yang sering menyuarakan suara kepada pemerintah, sehingga kampus UIN Suska pernah dikenal sebagai kampus perjuangan. Hal ini disebabkan mahasiswa UIN memiliki rasa idealisme dan solidaritas yang tinggi terhadap kepentingan-kepentingan rakyat terutama dalam mengkritisi kebijakan penguasa yang tidak berpihak kepada kentingan rakyat tersebut, sehingga mahasiswa digelar sebagai *The Agent of Change* dan *Social of Control* yang senantiasa mengontrol kebijakan yang diterapkan pemerintah atau penguasa.¹³

Namun disisi lain, menurut Mantara Rusli mahasiswa UIN Suska Riau yang tergabung dalam aktivis HMI mengatakan bahwa gelar sebagai pengontrol kebijakan pemerintah akhir-akhir ini tidak lagi sesuai bila dibandingkan dengan minat mahasiswa yang tergabung di dalam aksi demonstrasi atau dengan kata lain mahasiswa sekarang lebih cenderung bersikap diam dari pada tergabung di dalam gerakan moral berupa demonstrasi. Hal ini bisa dilihat ketika demonstrasi dilakukan mahasiswa UIN Suska Riau dari berbagai organisasi yang ada, maka terlihat hanya

¹³ Ilham Khuldi, Mahasiswa Psikologi UIN Suska Riau. *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Desember

belasan saja mahasiswa yang tergabung didalamnya. Apalagi sekarang hampir tidak terdengar dikampus UIN ini suara-suara lantang dalam bentuk orasi yang dilakukan mahasiswa.¹⁴

Minimnya peminat mahasiswa UIN Suska Riau dalam menyampaikan pendapat melalui demonstrasi tentunya disebabkan oleh banyak faktor yang memengaruhi mereka dalam berpersepsi mengenai demonstrasi, demonstrasi akan mendapatkan persepsi tersendiri bagi mahasiswa terutama mahasiswa UIN Suska Riau.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih jauh mengenai Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN Suska Riau serta pemahaman mereka terhadap demonstrasi sebagai manifestasi dari hak kebebasan berpendapat dalam menyalurkan aspirasi, kritik, pandangan. Penelitian ini juga diikuti sertakan dengan metode analisis data yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengangkat topik ini dengan judul :

**“PERSEPSI AKTIVIS MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUSKA RIAU TERHADAP DEMONSTRASI DALAM MENYAMPAIKAN
PENDAPAT MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

¹⁴ Mantara Rusli, Mahasiswa UIN Suska (Aktivis HMI) *Wawancara* Pekanbaru 4 September 2008

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada “persepsi mahasiswa UIN Suska Riau terhadap demonstrasi dalam menyampaikan pendapat menurut pandangan Fiqh Siyasah” persoalan ini juga dibatasi pada Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN Suska pada aktivitas demonstrasi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini.

C. Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN Suska Riau terhadap demonstrasi dalam menyampaikan pendapat ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN Suska terhadap demonstrasi?
3. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN Suska Riau?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian.

- a. Untuk mengetahui Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN Suska Riau mengenai demonstrasi.
- b. Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang mempengaruhi Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN Suska Riau terhadap demonstrasi.

- c. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN Suska Riau mengenai demonstrasi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi bagi kajian keislaman, khususnya masalah kebebasan individu dalam mengeluarkan pendapat.
- c. Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almamater dimana penulis menuntut ilmu.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah UIN Suska Riau. Pertimbangan mengambil lokasi ini menjadi tempat penelitian, karena mudah dijangkau penulis serta penulis melihat mahasiswa sekarang terkesan tidak begitu tertarik terhadap aksi demonstrasi.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian ini adalah mahasiswa UIN Suska Riau. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah persepsi mereka terhadap pelaksanaan demonstrasi.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa UIN Suska Riau sebanyak 10520 orang, mengingat jumlah populasi yang banyak maka penulis menggunakan tehnik purposive sampling yaitu pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu sehingga memenuhi keinginan dan kepentingan peneliti,¹⁵ adapun sample diambil dari pengurus BEM pada masing-masing fakultas sebanyak 120 orang, dengan rincian 15 orang pengurus BEM fakultas dari 8 fakultas yang ada di UIN Suska Riau. Kemudian dari aktivis pergerakan diambil 5 orang untuk diwawancara demi kesempurnaan penelitian ini.

4. Sumber Data

Adapun data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penyebaran angket untuk 120 orang pengurus BEM fakultas yang terdiri dari 15 orang pengurus yang diambil sampel pada masing-masing fakultas.
- b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan yang dimaksud.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan :

¹⁵ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi* (Sinar Baru Algensindo; Bandung 2008) cet. 11 Hal. 73

a. Angket

Yaitu metode pengumpulan data di lapangan dengan menyebarkan angket kepada yang berkaitan dengan permasalahan ini.

b. Wawancara

Yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab yang dilakukan oleh penulis terhadap aktivis-aktivis UIN Suska Riau yang sering melakukan aksi demonstrasi.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul, akan dianalisa dengan menggunakan Metode analisa data kualitatif, yaitu analisa dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut kemudian data tersebut diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari, latar belakang masalah, Pokok Permasalahan, batasan masalah, tujuan dan Kegunaan Penelitian, metode penelitian dan sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian, yang terdiri dari : Sejarah Ringkas UIN Suska Riau, Visi, Misi dan Karakteristik, Tujuan Pendidikan dan Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

- BAB III Gambaran Umum tentang Demonstrasi dalam Menyampaikan Pendapat,
yang terdiri dari; Pengertian Demonstrasi, Dasar Hukum Demonstrasi dan
Demonstrasi Menurut Islam.
- BAB IV Analisa data terhadap Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN Suska Riau
terhadap demonstrasi yang terdiri dari : Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN
Terhadap Demonstrasi, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Persepsi dan
Pandangan Fiqh Siyasah
- BAB V Penutup yang terdiri dari ; Kesimpulan dan saran-saran

BAB II

TINJAUAN TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat UIN Suska Riau

Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau merupakan hasil pengembangan atau peningkatan status pendidikan dari Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru yang secara resmi dikukuhkan berdasarkan peraturan presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 Tanggal 4 Januari Tahun 2005 oleh Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Tindak lanjut perubahan status ini, menteri Agama RI menetapkan Organisasi dan Tatakerja UIN Suska Riau berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2005 tanggal 4 April 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Adapun Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim (IAIN Susqa) Pekanbaru, didirikan pada tanggal 19 September 1970 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 194 Tahun 1970. Institut ini diresmikan berdirinya oleh menteri Agama Republik Indonesia K.H Ahamad Dahlan pada tanggal 19 September 1970 berupa penandatanganan piagam dan pelantikan Rektor yang pertama, Prof. H. Ilyas Muhammad Ali.

IAIN ini pada mulanya berasal dari beberapa Fakultas dari Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang kemudian dinegerikan, yaitu Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Riau di Pekanbaru, Fakultas Syari`ah Universitas Islam Riau di Tembilahan, dan Fakultas Ushuluddin Mesjid Agung An-Nur Pekanbaru.

Dengan persetujuan Pemerintah Daerah, maka Institut Agama Islam Negeri Pekanbaru diberi nama dengan Sulthan Syarif Qasim , yaitu nama Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura ke-12 atau yang terakhir yang juga nama pejuang Nasional asal Riau. Pengambilan nama ini mengingat jasa-jasa dan pengabdian beliau terhadap negeri, termasuk dibidang pendidikan.

Ketika didirikan, IAIN Susqa hanya terdiri atas tiga Fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari`ah, dan Fakultas Ushuluddin. Namun semenjak tahun 1998/1999, IAIN Suska telah pula mengembangkan diri dengan membuka Fakultas Dakwah. Fakultas ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 104 tahun 1998 tanggal 24 Februari 1998. fakultas ini pada mulanya berasal dari Jurusan Dakwah yang ada di Fakultas Ushuluddin.

Keinginan untuk memperluas kajian di IAIN Sutan Syarif Qasim Pekanbaru muncul melalui seminar cendekiawan muslim (1985) Seminar Budaya Kerja dalam Perspektif Islam (1987), dan dialog ulama serta cendekiawan se-Propinsi Riau tiga tahun berturut-turut (1996, 1997, 1998) melahirkan rekomendasi : agar IAIN Sultan Sarif Qasim Pekanbaru membuka program studi baru (umum). Melalui keputusan rapat senat IAIN Susqa tanggal 9 September 1998 yang menetapkan perubahan status IAIN Susqa menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, maka dilakukan persiapan secara bertahap. Mulai pada tahun akademik 1998/1999 telah dibuka beberapa jurusan atau program studi umum pada beberapa Fakultas, seperti jurusan Psikologi pada Fakultas Tarbiyah, jurusan Manajemen dan Manajemen Perusahaan pada Fakultas Syari`ah dan jurusan Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dak`wah. Pada tahun akademik 1999/2000 IAIN telah pula membuka Jurusan / Program Studi Teknik Informatika. Satu tahun kemudian, tepatnya tahun akademik 2000 /2001, dibuka pula program studi Teknik Industri . kedua jurusan program studi terakhir ini untuk sementara ditempatkan dibawah administrasi Fakultas Dakwah.

Pada tahun 2002/2003 jurusan-jurusan program studi umum yang ada pada Fakultas diatas ditambah beberapa program studi baru, ditingkatkan menjadi Fakultas yang berdiri sendiri. Fakultas –fakultas tersebut adalah Fakultas Sains dan Teknologi dengan jurusan / Program Studi Tehnik Informatika, Tehnik Industri, Sistem Informasi, dan Matematika Terapan; Fakultas Psikologi dengan jurusan Psikologi; Fakultas Ekonomi dengan Jurusan /Program Studi Menejemen, Akuntansi dan Menajemn Perusahaan Diploma III ; dan Fakultas Peternakan dengan Jurusan Ilmu Produksi Ternak yang terdiri atas Program Studi Teknologi Produksi Ternak dan Teknologi Hasil Ternak.

Dengan demikian , pada tahun akademik 2002/2003, IAIN Suska sebagai persiapan UIN Riau elah mempunyai 8 Fakultas , yaitu : Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari`ah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Peternakan.

Peningkatan status IAIN menjadi UIN dimaksudkan untuk menghasilkan sarjana muslim yang mampu menguasai , mengembangkan, dan menerapkan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi secara integral, sekaligus menghilangkan padangan dikhotomi.

Pengembangan UIN Suska ini tidak hanya pada bidang akademk semata, seperti melalui pembukaan Fakultas-fakultas dan program-program studi baru, tapi juga diarahkan pada pengembangan fisik, sarana, dan prasarana. Dewasa ini UIN Suska telah mempunyai lahan kampus seluas 78,25 Ha yang terdiri atas 3,65 Ha di jalan K.H Ahmad Dahlan dan 74, 50 Ha di Km. 15 Jl. Soebrantas.

Dewasa ini UIN Suska telah memiliki bangunan gedung seluas 13.080 m2 yang terdiri atas 7.320 m2 dikampus “ Tuanku Tambusai” dan 5.760 m2 di kampus II di Jl. Soebrantas Km. 14,5 yang disebut juga dengan kampus “Raja Ali Haji”. Bangunan tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara seluas 11.595 m2. pembangunan fisik di kampu Raja Ali Haji gencar dilakukan, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi dan Kabupaten Kota, perusahaan swasta, maupun bantuan berbagai pihak lainnya, yang terdiri atas gedung perkuliahan, gedung perkantoran, gedung pusat kegiatan mahasiswa, gedung laboratorium dan sebainya.

B. Visi, Misi dan Karakteristik UIN Suska Riau

1. Visi

Visi UIN adalah mewujudkan Universitas Islam Negeri sebagai lembaga pendidikan tinggi utama yang mengembangkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara integral dikawasan Asia Tenggara Tahun 2013.

2. Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumberdaya manusia yang berkualitas secara akademik dan profesional serta memiliki integrasi pribadi sebagai sarjana muslim.
- b. Melaksanakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan menggunakan paradigma Islam.
- c. Memamfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan paradigma Islami.
- d. Menyiapkan sumberdaya manusia serta sarana, dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

3. Karakteristik

- a. Mengembangkan berbagai cabang ilmu pengetahuan dengan pendekatan religius sehingga nilai-nilai Islam menjadi roh bagi setiap cabang ilmu pengetahuan.
- b. Pengembangan paradigma ilmu yang memberi penekanan pada rasa iman dan tauhid
- c. Penyelenggaraan beberapa disiplin ilmu keislaman yang memperkuat domain akidah, ibadah, ahklak dan muamalah Islamiyah, dan penerapan

prinsip Islam dalam disiplin ilmu (IDI) sebagai upaya riil mewujudkan integrasi ilmu dengan Islam.

- d. Pembinaan dan pengembangan lingkungan yang madani sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- e. Perwujudan keunggulan akademik dan propfesionalisme yang didasarkan pada moral keagamaan dalam kehidupan kampus dikalangan civitas akademika.
- f. Mengembangkan studi Regional Islam Asia Tenggara dan Tamaddun Melayu sebagai pola ilmiah pokok.

C. Tujuan Pendidikan

1. Tujuan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 Bab II Pasal 2 ayat 1, tujuan pendidikan tinggi adalah:

- a. Menyapkan peserta didik, menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian.
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaan atau peningkatan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

2. Tujuan Pendidikan UIN

Sebagai lembaga Pendidikan Tinggi, maka tujuan pendidikan UIN Suska adalah:

- a. Menyiapkan peserta didik yang berakhlak mulia menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan keunggulan akademik, dan atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu agama Islam, teknologi, seni dan ilmu lain yang terkait.
- b. Menggali, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama Islam teknologi, seni dan ilmu lain yang terkait serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan martabat dan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional.

3. Tujuan Pendidikan Menurut Program

- a. Tujuan pendidikan Program Diploma adalah menghasilkan warga Negara berkualitas sebagai berikut :
 - 1). Berjiwa pancasila dan memiliki integritas dan kepribadian yang tinggi.
 - 2). Taat beribadah dan berakhlak mulia.
 - 3). Bersikap terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang keahliannya.
 - 4). Mempunyai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya ke dalam kegiatan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.

5). Mempunyai kemampuan untuk mengikuti pengembangan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya

b. Tujuan Pendidikan Program Sarjana (S.1) adalah menghasilkan warga Negara yang berkualitas sebagai berikut:

- 1). Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas serta kepribadian yang tinggi.
- 2). Taat beribadah dan berakhlak mulia
- 3). Bersikap terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang keahliannya.
- 4). Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara utuh dan baik sebagai produk maupun metode dan proses sebagai keahlian umum.
- 5). Memahami secara mendalam dan memiliki keahlian serta keterampilan untuk bekerja secara profesional dalam salah satu bidang ilmu pengetahuan Agama Islam, atau seperangkat cabang yang diperlukan untuk mnerjemahkan nilai-nilai ilmu agama Islam untuk diperlukan dalam pembangunan masyarakat dan pengembangan ilmu agama Islam.

c. Tujuan Pendidikan Program Magister (S.2) adalah menghasilkan warga Negara berkualitas sebagai berikut:

- 1). Berjiwa Pancasila dan memiliki kepribadian dan intergritas yang tinggi.
- 2). Taat beribadah dan berakhlak mulia.

3). Bersikap terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang keahliannya.

4). Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian secara terdapat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu berperan serta memecahkan persoalan masyarakat.

5). Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian yang mendalam dan mandiri terhadap masalah-masalah sosial dan teknologi, menghasilkan karya yang berbobot ilmiah dan menyelesaikan persoalan masyarakat maupun mengembangkan ilmu pengetahuan Islam.¹⁶

D. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan suatu untuk melaksanakan kegiatan mahasiswa dalam bidang eksekutif dan manajerial/leadership.

1. Struktur

Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Ketua
- b. Wakil ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara

¹⁶ Buku Panduan dan Informasi Akademik Tahun Akademik 2006/2007, Departemen Agama UIN Suska Riau 2006

- e. Ketua-ketua bidang sesuai kebutuhan

2. Tugas dan Fungsi

Adapun tugas dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua program kerja yang telah ditetapkan garis-garis besar program kerja (GBPK).
- b. Merencanakan dan melakukan koordinasi program kegiatan kemahasiswaan.

Adapun fungsi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah sebagai berikut:

- a. Eksekusi / pelaksana aspirasi mahasiswa (*student aspiration service*)
- b. Manajerial / leadership

3. Hak dan Tanggung Jawab

- a. Pengurus BEM mempunyai hak :
 - 1). Menyampaikan pendapat usul dan saran kepada Pimpinan Universitas / Akademi dan bagi BEM tingkat Fakultas dan Jurusan Bertanggung jawab kepada tingkatan masing-masing.
 - 2). Mendapat pembinaan, pembimbingan dan pendampingan dan pembina.
- b. BEM Universitas Bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Rektor dan BEM Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.

- c. BEM bertanggung jawab secara fungsional BLM serta mahasiswa yang mekanismenya diatur oleh BLM dan BEM.¹⁷

BAB III

TINJAUAN UMUM DEMONSTRASI

A. Pengertian Demonstrasi

Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka

¹⁷ [Http: Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas \(BEMFA\)@ Geoggle.com](http://Badan%20Eksekutif%20Mahasiswa%20Fakultas%20(BEMFA)%20@%20Geoggle.com)

umum.¹⁸ Sedangkan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagaimana secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Penulis melihat antara demonstrasi dan kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan suatu ungkapan yang berbeda tetapi memiliki tendensi keduanya ungkapan tersebut tersebut sama yaitu menyampaikan buah pikiran apakah itu nasehat, kritikan, saran, kecaman maupun penilaian-penilaian terhadap suatu kebijakan, dalam hal ini kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Dalam istilah bahasa arab untuk demonstrasi (unjuk rasa) adalah, *muzhaharah*, secara bahasa berasal dari kata *dhaharah* yang artinya memperlihatkan, menunjukkan atau memenangkan.²⁰

B. Sejarah Demonstrasi di Indonesia

Demokrasi diambil dari bahasa Yunani, yang secara etimologi “demos” dan “Cratein”. *Demos* adalah rakyat atau penduduk suatu daerah, sedangkan *cratein* adalah kekuasaan atau kedaulatan. Dari kedua kata tersebut lahirlah sebuah kata demokrasi yang berarti system pemerintahan suatu Negara yang kedaulatannya berada ditangan rakyat.²¹

¹⁸ Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, Pasal 1, Butir 1. dalam hal ini penulis mengutip dalam buku Abdussalam Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Hal. 25

¹⁹ *Ibid* Hal. 26

²⁰ Aus Hidayat Nur, *Fiqh Demonstrasi Kajian Hukum dan Urgensi Unjuk Rasa Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Pustaka Tarbiyatuna 2002) Cet I, Hal, 6

²¹ Inu Kencana Syafi'i, *Alqur'an dan Ilmu Politik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000) Cet. 2 hal. 258

Dapat juga dikatakan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat.²² Sedangkan didalam dunia modern demokrasi diartikan dengan suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*).²³

Jadi Negara demokrasi adalah suatu Negara / state yang mana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, rakyat berperan aktif dalam suatu Negara yang ikut serta dalam menerapkan kebijakan-kebijakan Negara tersebut.

Dalam suatu Negara demokrasi sangat dijunjung tinggi kebebasan berpendapat, karena kebebasan berpendapat tersebut merupakan suatu indikasi dari Negara demokrasi, dan hal tersebut sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam pemerintahan Negara yang bersangkutan. Rakyat diikut sertakan dalam pengambilan keputusan, karena dalam suatu Negara demokrasi, pengambilan keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat, disinilah hak rakyat untuk memberikan suara, saran-saran, tanggapan-tanggapan apakah secara langsung (system demokrasi langsung) ataupun secara perwakilan (system demokrasi klasik).²⁴

Semenjak tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah diterapkan beberapa bentuk demokrasi seperti demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan demokrasi pancasila hingga saat ini. Sehingga demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah Negara yang sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Hal ini terbukti dalam aturan kenegaraan maupun Undang-Undang Dasar sebagai suatu landasan

²² Ilham Gunawan, *Kamus Politik Internasional*, (Jakarta: PT Restu Agung, 1999) H. 258

²³ Sri Sumantri Marto Suwijnjo, *Pengantar Perbandingan antar Hukum Tata Negara*, (Jakarta : CV. Raja Wali 2001) h. 25

²⁴ Ismail Yusanto, *Islam Idiologi* (Jawa Timur : Al-izzah, 2004) h. 102

konstitusional terdapat pembahasan yang cukup mendetail tentang kebebasan berekspresi tersebut.

Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan menyatakan kehendak merupakan salah satu hak dasar dari warga Negara dan diakui serta dijamin oleh undang-undang. Kebebasan yang menyatakan pendapat, terutama dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi atau pengarahannya perlu diatur agar tidak melanggar kebebasan orang lain dan tidak menimbulkan akses yang merugikan kepentingan publik. Penyampaian pendapat di muka umum adalah refleksi dari suatu kecenderungan atau fenomena yang dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial.²⁵

Masalah kebebasan individu dalam demokrasi, maka kebebasan mengeluarkan pendapat atau demonstrasi bukannya hanya sekedar bebas berpendapat dan berbuat, melainkan harus pula disertai dengan tanggung jawab yang besar atas penggunaan kebebasan tersebut.

Hal ini sesuai dengan tendensi utama demokrasi Pancasila sebagai suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat, rakyatlah yang menentukan bentuk dan isi pemerintahan yang dikehendakinya sesuai dengan hati nuraninya. Dalam hal ini, sudah sewajarnya kepada kepentingan rakyat banyak dalam rangka tercapinya kemakmuran yang merata.

Secara psikologis individu dan Negara (nation) memiliki hubungan yang cukup erat dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Menurut Ernest Renan, nation adalah suatu jiwa, suatu asas spiritual suatu solidaritas yang besar yang berbentuk oleh

²⁵ Abdussalam, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum* (Jakarta: Restu Agung, 2006) cet. 1 hal. 60

perasaan yang timbul akibat pengorbanan-pengorbanan yang dibuat dan dalam masa depan hal tersebut dapat dibuat lagi. Relasi individu dan nation tercermin pula dalam bentuk peranan-peranan yang ada dalam diri individu itu sendiri yang terampil dalam unit-unit lingkungan social yang lebih makro. Hubungan langsung individu dan nation diekspresikan melalui posisinya sebagai warga Negara.²⁶

Pernyataan diatas merupakan suatu gambaran yang nyata tentang relasi individu dan Negara. Dimana pribadi seseorang warga Negara sangat erat hubungannya dengan Negara yang bersangkutan.

Didalam system demokrasi yang dianut bangsa Indonesia, demonstrasi merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh manusia sehingga mendapat perlindungan hokum dari Negara. Hal ini terdapat dalam pasal 28 undang-undang Dasar 1945 “Kemerdekaan menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan diatur sepenuhnya dalam undang-undang”.

Sejak tahun 1995, masih dalam pemerintahan Presiden RI Soeharto pada masa periode 1993-1998, kemerdekaan berfikir dan berbicara semakin marak dan merebah dengan bentuk konkret yaitu mengadakan demonstrasi, unjukrasa, pawai, rapat-rapat, seminar dan mimbar bebas. Unjuk rasa, demonstrasi dan pawai dilakukan oleh para pekerja perusahaan industri dalam menuntut hak-hak normative dengan tuntutan agar

²⁶ Munandar Suleman, *Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT Eresxo, 1990) Cet VI hal. 68

pengusaha dan pemerintah memenuhi tuntutan, antara lain Upah Minimum Regional (UMR) dan hak normative lainnya yang dipelopori oleh LSM, dan mahasiswa.

Rapat-rapat, seminar-seminar, dan mimbar bebas yang dilakukan oleh para LSM-LSM, petisi 50, para intelektual dengan focus pembicaraan mengenai kepemimpinan nasional periode tahun 1998-2003, menyarankan agar Presiden Soeharto tidak mencalonkan diri lagi dan lebih baik mengundurkan diri. Mereka juga menganalisis kebijakan politik dan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah Presiden RI Soeharto yang lebih mengutamakan alat kepentingan kekuasaan dan konglomerat atau pengusaha-pengusaha yang dekat dengan kekuasaan, serta menyoroti kepemimpinan Golkar agar kepemimpinan nasional periode 1998-2003 tetap berada di tangan Presiden Soeharto. Dalam menghadapi perkara kemerdekaan berpikir dan berbicara seperti bentuk konkret tersebut, pemerintah tidak lagi mengedepankan tindakan hukum secara adil, tetapi telah menggunakan hukum sebagai alat untuk menghadapi lawan-lawan politiknya. Dengan menggunakan hukum, pemerintah seakan-akan telah menciptakan pemerintahan yang demokratis.

Dengan semakin maraknya gejala penyampaian pendapat dimuka umum dalam bentuk demonstrasi, mimbar bebas dan lain sebagainya pada tahun 1995, maka masalah penyampaian pendapat dimuka umum menjadi masalah social politik yang harus disikapi oleh pemerintah pada saat itu. Sikap pemerintah yang dominan mengarah kepada pemamfaatan hokum demi menstabilkan kekuasaan dan lawan politik.

Pada masa transisi Pemilu tahun 1997 dan siding umum MPR tahun 1998, Negara Indonesia menghadapi krisis moneter dan sekaligus krisis ekonomi. Dalam pemilu tahun 1997, Golkar berupaya untuk mendapatkan kemenangan mayoritas dan berhasil memenangkan Pemilu 1997 dengan mayoritas. Atas permintaan para pengurus partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengangkat Soeharto menjadi Presiden dalam periode tahun 1998-2003. Presiden RI Soeharto bersedia diangkat kembali. Presiden diminta juga untuk memulihkan krisis moneter dan krisis ekonomi yang dihadapi Negara Indonesia.

Usaha Golkar tidak sia-sia dan dalam siding MPR, Soeharto dan BJ Habibie dipilih dan dilantik menjadi Presiden RI dan Wakil Presiden RI periode 1998-2003. presiden RI segera membentuk cabinet dan melantik cabinet serta mengeluarkan kebijaksanaan untuk mengatasi krisis moneter dan krisis ekonomi antara lain gaji Presiden sampai Esselon I selama satu tahun diserahkan kepada Negara. MUI menyerahkan emas kepada Presiden RI untuk Negara, kemudian diikuti dengan melaksanakan cinta rupiah. tetapi krisis moneter dan krisis ekonomi semakin terpuruk. Untuk mengatasi krisis tersebut pemerintah meminta bantuan IMF. IMF memberi bantuan, tetapi krisis moneter semakin terputuk.

Dalam keadaan krisis tersebut, rakyat semakin tidak percaya lagi kepada pemerintah orde Baru dan rakyat menghendaki pemerintah RI segera mengadakan Reformasi total yang dipelopori oleh mahasiswa dengan mengadakan unjuk rasa dan mimbar bebas. Gerakan mahasiswa tersebut didukung LSM-LSM, aktivitas-aktivitas politik yang tidak setuju dengan pemerintah Orde Baru beserta kabinetnya.

Dalam menghadapi demonstrasi dan mimbar bebas yang dilakukan mahasiswa, Menghankam Pangab Jenderal TNI Wiranto memerintahkan Rektor-rektor Perguruan Tinggi, mencegah mahasiswa keluar kampus. Demonstrasi dan mimbar bebas hanya dibenarkan dilakukan didalam kampus, tidak dibenarkan dilakukan diluar kampus, takut ditunggangi pihak ketiga yang dapat melakukan tindakan anarkis. Untuk itu, aparat keamanan melakukan pengamanan diluar kampus dan mencegah mahasiswa keluar kampus. Pertama memang dipatuhi, tapi lama- kelamaan mulai adanya pelanggaran dengan adanya mimbar bebas dijalan.

Kasus –kasus kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini mencapai puncaknya dan akibatnya cukup fatal. Peristiwa-peristiwa protesnya masyarakat beserta komponen masyarakat terhadap kegagalan pemerintah dan Golkar dalam memperbaiki citra perekonomian Negara akibat keterpurukan ekonomi ditahu 1997 betul-betul mengkadi wibawa pemerintah merosot pada saat itu. Tahun 1998 dicirikan dengan tahun yang penuh gejolak. Gelombang unjuk rasa para mahasiswa dan seluruh komponem masyarakat itu pada akhirnya menduduki gedung DPR/MPR dan berbuah terjadi peristiwa “trisakti” yang mendatangkan korban mahasiswa dan buah yang paling pahit adalah suksesi pemerintahan dari Soeharto kepada BJ Habibie.

Era pemerintah BJ Habibie, dicirikan dengan sedikit pencerahan masalah demonstrasi atau penyampaian kemerdekaan pedapat, terutama dengan dicabutnya peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, yang dinilai masih mengekang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum, dan dicabunya undang-undang No. 11/PNPS/1963 Tentang Tindak Pidana Survesi dan kemudian melahirkan undang-undang

tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan pada akhirnya berhasil di undangkan Undang-Undang No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sebagai realisasi pasal 28 Undang- undang Dasar 1945, Pemerintahan BJ Habibie, dapat mensikapi gejala demonstrasi, mimbar bebas dan sebagainya dengan menerapkan Undang-undang tersebut.²⁷

Demonstrasi atau untuk rasa mahasiswa dimuka umum merupakan gerakan moral tanpa adanya pemaksaan kehendak. Mahasiswa sering tidak mengetahui atau menyadari bahwa ada pihak-pihak ketiga yang menumpang kepentingan dalam gerakan moral mahasiswa. Dalam menghadapi pihak-pihak ketiga yang telah membaaur dengan mahasiswa, pasukan pengendali massa sulit mengambil tindakan keras kepada mereka yang melakukan tindakan anarkis. Akibatnya sering terjadi dimana demonstrasi yang semula sebagai gerakan moral berubah menjadi pemaksaan kehendak, agar pemerintah melaksanakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Hal itu juga, selain dengan penyusupan, juga disebabkan pejabat atau pengusaha yang menjadi sasaran unjukrasa atau demonstrasi, menolak untuk menerimanya dan tidak terjadi komunikasi serta tidak bersedia melaksanakan apa yang menjadi tuntutan aspirasi dan pendapat rakyat.²⁸

Gerakan mahasiswa sampai saat ini tetap konsisten sebagai gerakan moral. Sedangkan sikap dan tindakan pemerintah masih tetap arogan dan tidak mau mendengarkan aspirasi warga dan rakyatnya serta tidak mau memenuhi tuntutan dan

²⁷ *Op Cit.* Abdussalam, h.2-7

²⁸ *Ibid* : abdussalam Hal. 289

harapan rakyatnya. Padahal pemerintah Indonesia berbentuk kedaulatan rakyat, yang seharusnya menerima dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dan harapan rakyatnya. Pemerintah masih tetap bersikap melaksanakan kehendaknya tanpa memperhatikan tuntutan dan harapan warga dan rakyatnya

Secara teori dan normatif kemerdekaan menyampaikan pendapat memang benar mendapat perlindungan hukum. Tetapi realita dilapangan ternyata mereka dikekang dan dibatasi kebebasannya untuk mengeluarkan pendapat atau menyalurkan aspirasi. Begitu mereka bertentangan dengan pemerintah, mereka ditangkap, ditahan dan diproses hukum. Sedangkan bagi pejabat-pejabat atau instansi-instansi menolak dan tidak menerima massa unjuk rasa atau demonstrasi untuk menyampaikan pendapat tidak diberi sanksi apa-apa.

Oleh karena itu, dampak negative dari unjuk rasa atau demonstrasi mahasiswa menjadi tanggung jawab penuh pemerintah. Pemerintah semakin arogan dalam mengambil tindakan kekerasan terhadap warga yang menyampaikan aspirasi dan pendapatnya tanpa adanya kepedulian dari pemerintah. Unjuk rasa atau demonstrasi yang digelar mahasiswa bertujuan untuk menyadarkan pemerintah bahwa apa yang dilakukan pemerintah telah banyak menyimpang dari kedaulatan rakyat. Untuk itu seharusnya pemerintah menerima dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dan harapan warga dan rakyatnya. Bila pemerintah menerima dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dan harapan warga dan rakyatnya, maka dampak negative tersebut tidak akan terjadi.²⁹

D. Demonstrasi Menurut Islam

²⁹ *Ibid*, :Abdusalam Hal. 287

Dalam istilah bahasa Arab Demonstrasi adalah, *muzhaharah*, secara bahasa berasal dari kata *dhaharah* yang artinya memperlihatkan, menunjukkan atau memenangkan.³⁰

Ditengah dunia Islam dikenal istilah *muzhaharah*, Secara sederhana *muzahharah* dapat dikatakan adalah wasilah (sarana) dalam penyampaian untuk mendapatkan dukungan, menarik perhatian, dan membentuk opini umum ditengah masyarakat. Muzahharah ditandai dengan sejumlah orang urun kejalan, lapangan atau tempat – tempat khusus yang diperuntukkan untuk hal tersebut, guna menarik perhatian dan simpati publikterhadap pendapat yang disampaikan.³¹

Dimasa Rasulullah SAW, maupun dalam sejarah kaum muslimin dapat kita melihat bahwa secara umum *muzhaharah* ada dua jenis: pertama *muzhaharah fariyah*, sedangkan kedua *muzhaharah jam`iah*. Adapun *muzhaharah fardiyah* (unjuk rasa individu) adalah unjuk rasa yang dicontohkan oleh *Abu Dzar al-Ghifari*, ketika mengumandangkan kalimat tauhid ditengah orang banyak, dan *muzhaharah* yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, kepada seorang laki-laki yang dizalimi tetangganya, *muzhahara* ini inisiatifnya dari individu, ketika ia merasa bahwa kebenaran itu terkungkung sedemikian rupa sehingga ia ingin menyarakan pendapat ditengah masyarakat atau orang banyak. *Muzhaharah* ini biasanya dengan cara spontanitas tanpa perencanaan sebelumnya.

³⁰ Aus Hidayat, *Fiqh Demonstrasi kajian Hukum dan Urgensi Unjuk Rasa dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Pustaka Tarbiyatuna 2002) cet I hal. 6

³¹ *Ibid* hal. 5

Apabila keadaan yang memungkinkan unjuk rasa individu boleh dilakukan oleh setiap muslim dengan memperhatikan adab dan ahklak dalam menyampaikan pendapat didepan umum dan menarik dukungan public.

Sedangkan *muzaharah jam`iyah* (unjuk rasa bersama), adalah muzaharah yang dilakukan dengan perencanaan oleh suatu lembaga Islam tertentu yang berkepentingan untuk menyampaikan aspirasi kelompok. Seperti *muzhaharah I* yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau ketika Umar Bin Khatab dan Hamzah bin Abdul Mutholib baru masuk Islam. Rasul SAW merencanakan rumusans strateginya sedemikian rupa sehingga *muzhaharah* ini mampu membangun citra Islam dan menggalang opini yang baik dihati masyarakat saat itu. *Muzhaharah* bersifat kerja bersama mempunyai kekuatan hokum yang mengikat secara organisatoris bagi kaum muslimin yang tergabung dalam lembaga yang menyelenggarakan demonstrasi (unjuk rasa) tersebut, karena merupakan hasil dari suatu musyawarah untuk melakukan aksi. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

Artinya : dan bagi orang-orang yang menerima dan mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan

*musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.*³²

Bila ada yang tidak dapat mengikuti kegiatan ini, wajib baginya berpartisipasi dalam bentuk lain, misalnya dengan memeberikan dana bagi mereka yang ikut *bermuzhaharah*, menyediakan kendaraan, makanan atau atribut *muzhaharah*.³³

Al-Qur`an dan hadist tidak secara langsung menyuruh kita untuk melakukan *muzhaharah* sebagai demontrasi, sebagaimana kita pahami sekarang ini, yang diperintahkan adalah menyampaikan kebenaran, sehingga menyampaikan atau memperjuangkan kebenaran adalah wajib .

Didalam Al-Quran, terdapat dalam surat as-Shof ayat 9 yang berbunyi :

Artinya : “*Dialah yang mengutus rasulNya dengan membawa petunjukNya dan agama yang benar agar dia memenangkan diatas segala-gala agama meskipun orang musrik benci*”³⁴

Pada ayat diatas, kalimat *liyudzirahu alad diini kullih* (agar diperlihatkan dan dimenangkan atas semua agama) menunjukkan bahwa agama Allah SWT, yang mulia ini bersifat terang, terbuka, jelas dan untuk dimenangkan atau diperjuangkan oleh para

³² Depag RI, *al-Quran dan Terjemahan* , (Semarang: CV Toha Putera) Cet. Hal 929

³³ Aus Hidayat Nur, *op-cit* h. 60

³⁴ Depag RI, *op-cit* h. 60

penganutnya. Karena itu *Muzahharah* secara bahasa dapat dikatakan memiliki dasar al-Quran yang kuat berdasarkan ayat ini.³⁵

Dari ayat Al-Quran dan hadist yang penulis kumpulkan, ini menunjukkan tentang memperjuangkan kebenaran yaitu kalimat *haq*. Maka dari sini penulis mengambil hukum dengan menggunakan methode Qiyas / analog yaitu, mengambil `illat yang sama dengan demonstrasi hukumannya adalah boleh, bahkan menjadi wajib, bila kondisi tidak memungkinkan lagi, seperti orang yang telah nyata bertindak maksiat.

Pada dasarnya segala macam *muzhaharah* atau demonstrasi yang diniatkan karena Allah SWT, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam adalah salah satu bentuk mengingkari kemungkaran. *Muzhaharah* atau demonstrasi seperti ini memiliki niat urgensi besar dalam menampakkan kekuatan kaum muslimin. *Muzhaharah* untuk membela penderitaan ummat Islam itu lebih spesifik lagi, karena memperlihatkan solidaritas ukhwh kaum muslimin terhadap saudar-saudara mereka yang dizholimi.³⁶

Dalam menunjukkan adanya kebebasan berbicara dalam ajaran Islam, sehingga seseorang mengucapkan kata-kata yang benar (*kalimat haq*) tidak boleh dilarang atau dihalang-halangi oleh siapapun. Namun dalam hadist Nabi SAW, tidak menunjukkan secara pasti bentuk mengucapkan kalimat *haq* dihadapan penguasa yang zalim, apakah cukup dilakukan sendirian atau orang banyak, karena itu belaku ketentuan, apabila diungkapkan oleh banyak orang tentu akan lebih baik nilainya dibandingkan dilakukan oleh seorang individu, seperti , Nabi Musa As, ketika menyampaikan kebenaran Islam didepan Fir'aun, memohon kepada Allah SWT, agar ditemani oleh saudaranya Nabi

³⁵ *Ibid* h. 85

³⁶ Aus Hidayat Nur, *op-cit* h. 10

Harun As, beliau bahwa didampingi oleh saudaranya itu perjuangannya akan lebih kokoh, Nabi Harun As, lebih paseh berbicara dihadapan umum dari padanya.

Karena bentuk-bentuk penyampaian kalimat *haq* ini semata merupakan wasilah (sarana) yang dapat ditampilkan dalam beraneka ragam cara sesuai dengan semangat zaman. Dengan demikian ber *muzhaharah* atau demonstrasi untuk mengoreksi penguasa tak kala ia melakukan perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat banyak juga, yang membuat, hanya merupakan sarana saja. Sementara itu, dalam pandangan syarai`at Islam perintah kepada sesuatu yang wajib merupakan saran untuk mewujudkannya menjadi wajib pula (*al amru bisya`ien amrun bi-wasaailihi*).³⁷

Hukum asal demonstrasi *Muzharrahah* atau demonstrasi adalah mubah alias boleh, muzarrahah adalah *Wasilah* (sarana), karena *muzharrahah* mengambil hukum yang dimiliki oleh umumnya *wasilah*, dan hukum asal setiap *wasilah* adalah *ibahah* (boleh) dan segala hal yang mencapuri *wasilah* berupa *mukhallafah* (penyimpangan) maka, *wasilah* itu mengambil hukum yang dimiliki oleh *al-muqasshid* (tujuan). Karena *muzahharah* itu mengambil hukum *wasilah*, jika wasilah itu menyimpang, maka hukum *muzhahharah* akan menyimpang seuai dengan dengan tujuan yang diinginkan oleh *wasilah*.

Adapun yang dimaksud kaum muslimin dengan sasaran dari *wasilah* ini tidak lain adalah menampakkan kebenaran, menolak kezaliman, dan mengungkap kejahatan. Selain itu dengan *muzhahharah* atau demonstrasi kaum muslimin dapat mengasah semangat

³⁷ Abdul Mudjid , *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia), 1996 cet. 11 h. 10-11

beramar *ma`ruf dan nahi mungkar*, melalui lisan, pena dan tangan mereka sesuai dengan sarana yang mereka miliki dan mereka mampu melakukannya.³⁸

Muzhaharah atau demonstrasi bersama dalam menentang kebatilan adalah, sunnah syar`I dan masih berlaku sampai sekarang, yang disunnahkan Allah SWT, dalam rangka unjuk pengingkaran terhadap kerusakan.

Sedangkan menurut Abdussalam bin Barjas al Abdul Karim mengatakan bahwa *Amar ma`ruf nahi mungkar* merupakan salah satu tiang agama. Diharapkan dengan metodologi seperti itu akan tersosialisasi kebaikan dan segala bentuk kebathilan akan musnah.

Allah mewajibkan kepada umat Muhammad saw., untuk melaksanakan *amar ma`ruf nahi mungkar* sebagaimana firman Allah :

Artinya : “hendaklah ada diantara kamu segolongan ummat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma`ruf* dan mencegah dari yang *mungkar*, merekalah orang-orang yang beruntung”

Kata *minkum* pada ayat diatas menunjukkan untuk penjelasan bukan untuk sebagian. Oleh karena itu, wajib bagi ummat ini *beramal ma`ruf dan nahi mungkar*, tetapi kewajibannya hanya fardu kifayah, yang apabila sebahagian ummat telah

³⁸ Aus Hidayat, *opcit* h. 15

melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi yang lainnya. Demikian yang dipahami oleh Jumhur Ulama.³⁹

Dalam undang-undang RI No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 . dalam undang-undang ini dimaksudkan dengan :

1. kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.
2. di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat oleh setiap orang.
3. unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum.⁴⁰

Dalam Bab IV bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat dimuka umum pasal 9 ayat 1 bentuk penyampaian pendapat dimuka umum dapat dilaksanakan dengan cara :

1. Unjuk rasa atau demonstrasi
2. Pawai
3. Rapat umum; dan atau;
4. Mimbar bebas⁴¹

³⁹ Abdussalam Bin Barjas al Abdul Karim, *Etika Mengkritik Penguasa*, (Surabaya; Pustaka Assunnah , 2002) cet. 1 h. 27-28

⁴⁰ Undang-undang serikat buruh tahun 2000 dan Undang-undang tentang unjuk rasa, (Bandung : Citra Umbara) h. 136-137

Dari dasar hukum diatas, baik yang terdapat dalam Al-Quran dan hadist maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemerintahan Indonesia, dapat dilihat bahwa hukum demonstrasi adalah boleh dibenarkan oleh Islam. Akan tetapi bagaimana pola dan bentuk yang dibenarkan oleh Islam, maka bisa dilihat pada keterangan berikut.

Demonstrasi boleh diikuti oleh seorang muslim sepanjang demonstrasi tersebut sesuai dengan tuntutan Islam, yaitu bermamfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi masyarakat. Berdemonstrasi dimaksudkan untuk mencari solusi bukan untuk menimbulkan masalah baru atau memperpanjang masalah yang sudah ada. Oleh karena itu jangan sampai seorang muslim melakukan demonstrasi dengan landasan asal beda pendapat dengan orang lain atau asal protes karena ketidak setujuannya.

Demonstrasi yang sesuai dengan tuntunan Islam meliputi maksud sebagai berikut :

1. Upaya mengagungkan kebenaran dan ajaran Islam.
2. Menunjukkan kelemahan yang bathil.
3. Menunjukkan solidaritas bagi sesama yang tertindas dan menderita akibat kezaliman penguasa.
4. Berpartisipasi untuk mengurangi penderitaan masyarakat umum.
5. Menolak diberlakukannya aturan yang zalim ditengah suatu komunitas.
6. Menampakkan kejahatan dan tipu daya yahudi dan pengikutnya.

Sudah jelas, bahwa ummat ini adalah sebaik-baik ummat yang senantiasa berbuat ikhsan sehingga keberadaannya sangat besar mamfaatnya bagi segenap ummat manusia. Dengan amar ma`ruf dan nahi mungkar itu mereka menyempurnakan seluruh kebaikan

⁴¹ *Ibid* h. 140

dan kemamfaatan bagi ummat manusia, sedangkan bagian ummat yang lain tidak ada yang memerintahkan semua yang ma`ruf bagi kemaslahatan seluruh ;apisan ummat manusia, dan tidak pula melarang semua orang berbuat kemungkaran.⁴²

Jika kemungkaran lebih dominan, perlu dicegah, meskipun akan membawa resiko hilangnya kema`rufam yang lebih kecil, maka menurut yang maruf akan mengakibatkan munculnya kemungkaran yang lebih besar. Dalam kondisi yang seimbang antara ma`ruf dan yang mungkar, dari segi kualifikasi, amar ma`ruf nahi mungkar secara umum harus dilaksanakan.⁴³

Kamungkaran yang diharamkan benar-benar mungkar menurut syariat, atau berdasarkan kaidah yang pasti, sedangkan kemungkaran tersebut tidak bisa di ukur hanya berdasarkan pendapat dan ijtihaat, karena pendapat dan ijtihaat bisa benar dan bisa salah.⁴⁴

Dengan demikian orang muslim bukan hanya sekedar orang shaleh untuk dirinya, berbuat baik meninggalkan keburukan, hidup pada lingkungannya sendiri, tidak mempedulikan kebaikan disingkirkan disekitarnya, tidak mempedulikan keburukan disekitarnya. Tapi orang muslim adalah orang yang shaleh terhadap dirinya dan shaleh terhadap orang lain.

Kemungkaran macam apapun yang menampakkan kehidupan harus diusir dari masyarakat muslim, orang muslim dituntut senantiasa menghadapi kemungkaran dan mengusirnya, sehingga tidak ada yang menyisa kecuali kebenaran di bumi Allah SWT.⁴⁵

⁴² Ibnu Taimiyah , *Etika Beramal Ma`ruf nahi mungkar*, (Jakarta; Gema Insani Press) 1995, cet IV hal. 18

⁴³ *Ibid* h. 28

⁴⁴ Yusuf Qardawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Quran dan Sunnah*, (Jakarta; Pustaka Al Kuasar) 1997 Cet. 1 h. 169-170

⁴⁵ *Ibid* h. 168

Permasalahan yang beraneka ragam bentuk dan jenisnya, yaitu menyeru kepada setiap individu, keharusan untuk melaksanakan Undang-undang, bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukan, menyeru untuk berbuat baik, melarang melakukan hal-hal yang cenderung tidak mendangkan keuntungan bagi orang banyak, kewajiban itu dalam bahasa sekarang dinamakan kebebasan menyampaikan pendapat, tidak cukup itu saja, kewajiban tersebut menjadi kewajiban individu dan kelompok untuk melakukan perbuatan didalam masyarakat.⁴⁶

Apapun bentuk-bentuk demonstrasi yang diperbolehkan dalam Islam menurut Shek al Munajjid adalah sebagai berikut:

- Tidak boleh bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan disaat berlangsungnya aksi demonstrasi.
- Tidak bolehnya berdiri orang demonstran dihadapan kuburan orang kafir atau meletakkan karangan bunga diatas kuburannya.
- Tidak boleh menghinakan diri dengan ungkapan-ungkapan yang merendahkan kaum muslimin.
- Tidak boleh menzalimi orang lain, seperti menutup jalan dan mematikan lampu lalu lintas.
- Tidak boleh mempergunakan pola caci maki, dan celaan-celaan yang tidak diperbolehkan syariat.⁴⁷

⁴⁶ Diaduddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta; Gema Insani Press) 2001 cet. I hal. 259

⁴⁷ Abdussalam bin Bajas, *opcit* h. 71-72

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengertian Persepsi

Dalam Memberikan definisi atau pengertian persepsi, tidak akan terlepas dari pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah, namun penulis tidak menjumpai pengertian persepsi secara istilah. Dalam tulisan ini hanya mengemukakan pengertian persepsi secara bahasa.

Persepsi berasal dari kata "*pesceptio*" bahasa latin yang berarti : pengertian, pandangan, penerimaan, sambut.⁴⁸ Persepsi juga berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Perseption*" yang berarti pandangan.

Dari pengertian menurut bahasa diatas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa persepsi tersebut adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu. Dalam hal ini, penulis ingin meneliti lebih jauh bagaimana pengamatan atau Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN terhadap pelaksanaan demonstrasi dalam menyalurkan aspirasi terhadap pemerintah.

B. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Demonstrasi merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan demokrasi, karena demonstrasi merupakan salah satu hak kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum baik pendapat tersebut berupa tanggapan, saran kritikan dan lain sebagainya untuk disampaikan kepada pemerintah yang berkuasa.

⁴⁸ K. Prent CM, Drs. J. Adisubrata, Drs. WJS. Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*, Jakarta : TT, hal. 47

Dengan diberikannya kebebasan berpendapat yang diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 yang berbunyi “ kemerdekaan menyampaikan pendapat dan fikiran dengan lisan dan tulisan diatur sepenuhnya dalam undang-undang”. Kemudian didalam Peraturan Perundang-Undangan No. 2 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat dimuka umum juga mendapat pengaturan.

Dengan adanya undang-undang tersebut membuktikan bahwa demonstrasi di Negara demokrasi merupakan suatu hak yang sangat dijaga dan dihormati sehingga siapa saja yang menyampaikan pendapat, saran, ataupun kritikan maka akan mendapat perlindungan dari hokum atau undang-undang.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, demonstrasi yang sering ditempuh masyarakat khususnya di Kota Pekanbaru sebagai mekanisme penyampaian hak kritik terhadap pemerintah, dengan maraknya demonstrasi, penulis ingin mengetahui seberapa pemahaman ungkapan demonstrasi dengan responden yang terdiri dari mahasiswa/I UIN Suska Riau.

TABEL I
PEMAHAMAN RESPONDEN TERHADAP DEMONSTRASI

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Hak untuk Menyampaikan Pendapat (Kritik, Saran. Dll)	153	66 %
2	Hak Kebebasan berbicara	45	20 %
3	Hak untuk Berbuat Anarkis	4	2 %
4	Tidak Tahu	28	12 %
	Jumlah	230	100%

Dari tabel I diatas dapat dilihat bahwa persepsi responden yang memahami bahwa demonstrasi adalah untuk menyampaikan pendapat adalah sebanyak 153 orang atau 66%, sementara yang memilih demonstrasi sebagai hak kebebasan berbicara adalah sebanyak 45 orang atau 20 % , kemudian 4 orang atau sekitar 2 % yang memilih bahwa demonstrasi adalah hak untuk melakukan anarkisme, dan yang memilih tidak tahu adalah sebanyak 28 orang atau 12 %.

Tabel diatas merupakan hasil dari persepsi responden menganggap bahwa demosntrasi merupakan hak yang dimiliki seserorang atau kelompok guna untuk menyampaikan pendapat berupa kritikan, saran, kecaman, dukungan dll. Kepada pemerintah atau kepada siapa saja yang melanggar hak-hak orang lain.

Dari persepsi diatas terdapat beberapa factor yang mempengaruhi mereka dalam menjadikan demonstrasi sebagai salah satu cara mengkritisi pemerintah. Untuk mengukur sejauhmana pandangan mahasiswa UIN terhadap demonstrasi, dapat kita lihat dari jawaban yang dikemukakan oleh responden baik melalui angket ataupun melalui wawancara untuk lebih jelasnya pengaruh tersebut dapat kita lihat table dibawah ini;

TABEL II
LATAR BELAKANG DILAKUKAN DEMONSTRASI

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Karena Protes Terhadap Kebijakan Pemerintah	109	48%
2	Karena Mendukung Kebijakan Pemerintah	14	6%
3	Karena Menunjukkan Rasa Idealisme Mahasiswa	23	10%
4	Karena di bayar oleh Pihak Lain	72	31%
5	Tidak Tahu	12	5 %
	Jumlah	230	100%

Dari tabel II diatas dapat di uraikan bahwa sebagian besar responden berpersepsi bahwa latar belakang dilakukan demonstrasi adalah karena untuk melakukan protes atau kritik terhadap pemerintah yaitu berjumlah 109 orang responden, kemudian dilanjutkan dengan karena telah dibayar oleh pihak lain yaitu persepsi yang terbanyak kedua sejumlah 72 orang responden, kemudian 23 orang responden berpersepsi bahwa latar belakang demonstrasi dilakukan karena untuk menunjukkan eksistensi mahasiswa, kemudian 14 orang responden yang berpersepsi bahwa demonstrasi dilakukan oleh ingin mendukung kebijakan pemerintah dan terakhir 12 orang responden yang memilih tidak tahu mengenai latar belakang dilakukannya demonstrasi tersebut.

Demonstrasi merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dimiliki semenjak lahir, yaitu berupa hak kebebasan berpendapat, mengeluarkan pikiran, lisan dan tulisan dan lain sebagainya diatur oleh Negara, didalam hak kebebasan berpendapat tersebut juga terdapat berbagai hak-hak yang dimiliki manusia yaitu berupa hak berbicara didepan umum, hak berpendapat, dan termasuk hak mengeluarkan kritik, semua hak tersebut diatas dimiliki oleh setiap dan dalam pelaksanaannya diatur sepenuhnya dalam Undang-undang.⁴⁹

Demonstrasi bisa dilakukan siapa saja yang merasa hak mereka terganggu oleh orang lain atau pihak lain, dari sekian banyak demonstrasi yang ada, kebanyakan pelaku atau yang memelopori demonstrasi tersebut adalah dari kalangan mahasiswa.

Hal ini bisa dilihat terhadap persepsi responden pada tabel berikut :

TABEL III
PERSEPSI RESPONDEN TENTANG PELAKU DEMONSTRASI

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Masyarakat Umum	69	29 %
2	Mahasiswa / Pelajar	113	49 %
3	Lembaga- lembaga politik / non politik	30	14 %
4	Tidak tahu	18	8 %
	Jumlah	230	100%

⁴⁹ Ilham Khuldi, (Aktifis HMI UIN suska Riau) wawancara ,Pekanbaru, tgl 9 Mei 2009

Dari tabel III diatas dapat diketahui bahwa persepsi responden yang memilih pelaku demonstrasi yang terjadi adalah dari kalangan mahasiswa atau pelajar yaitu sebanyak 113 orang atau 49 % responden, sedangkan responden yang memilih masyarakat umumlah pelaku demonstrasi adalah sebanyak 69 Responden atau 29 %, kemudian 30 orang yang memilih bahwa demonstrasi dilakukan oleh lembaga-lembaga non partai politik atau lembaga politik dan yang memilih tidak tahu adalah sebanyak 18 orang atau sekitar 8 %.

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk tindakan yang di perlihatkan oleh masyarakat terhadap pemerintah dalam menghadapi satu bentuk perubahan menuju *amar ma`ruf nahi mungkar*. Ketidakpuasan masyarakat baik terhadap pemerintah atau para penguasa maupun pihak lain yang mengganggu hak mereka merupakan salah satu factor pendorong terjadinya demonstrasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini;

TABEL IV
PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP TUJUAN DEMONSTRASI

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Untuk amar ma`ruf nahi mungkar	135	58 %
2.	Untuk Mengungkap masalah baru	32	14 %
3.	Untuk Pamer	45	20 %
4.	Tidak tahu	18	8 %
	Jumlah	230	100%

Dari tanggapan responden diatas dapat kita lihat bahwa kebanyakan responden memilih jawaban terhadap tujuan demonstrasi adalah untuk menegakkan amar ma`ruf dan Nahi mungkar yaitu sebanyak 135 orang. Kemudian di ikuti dengan jawaban bahwa demontsrasi hanyalah untuk pamer dengan jumlah 45 orang, sedangkan yang memilih jawaban untuk mengungkap masalah baru dengan jumlah 32 orang, dan yang memilih tidak tahu adalah sebanyak 18 orang.

Amar ma`ruf nahi mungkar merupakan bentuk dari penegakan kebenaran dan keadilan, artinya amar ma`ruf dan nahi mungkar berawal dari tidak terpenuhinya hak-hak seseorang sehingga perlu untuk di lakukan penegakkan keadilan.

Menurut Two Bagus PP, Demonstrasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh mahasiswa atau masyarakat dalam mengungkap masalah masalah yang belum diketahui oleh masyarakat umum, sehingga dengan di lakukan demonstrasi tersebut yang mengangkat sebuah isu baik yang berhubungan dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab maupun mengenai hal-hal yang bersifat positif yang biasanya diikuti dengan aksi demonstrasi berupa dukungan.⁵⁰

Namun demikian, menyampaikan pendapat kepada pemerintah bisa dilakukan dengan banyak cara, diantaranya adalah melalui media massa, ormas LSM, partai politik, berdialog langsung dengan wakil rakyat, demonstrasi dan lainnya. Dari banyak cara yang bisa dilakukan oleh responden dalam menyampaikan pendapat terhadap pemerintah maka bisa diihat pada tabel dibawah ini manakah jalan yang lebih disukai responden dalam menyampaikan hak kritik terhadap pemerintah:

⁵⁰ Two Bagus PP, aktivis UIN Suska (Ketua Umum BM1R) wawancara, Pekanbaru, 15 April 2009

TABEL V
PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP MEKANISME PENYAMPAIAN
PENDAPAT

No	Jawaban Responden	Fekuensi	Persentase
1.	Melalui Berdemonstrasi	93	39 %
2.	Berdialog dengan wakil rakyat	44	19 %
3.	Melalui Media Massa		27 %
4.	Tidak Tahu	61	15 %
		32	
	Jumlah	230	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa diantara responden memilih melalui berdemonstrasi dalam menyampaikan pendapat yaitu sebanyak 93 orang, sedangkan melalui media massa adalah sebanyak 61 orang, kemudian 44 reesponden memilih berdialog dengan wakil rakyat/ pemerintah, sementara yang memilih tidak tahu adalah sebanyak 32 orang responde.

Ada hal yang menarik mengenai penomena demonstrasi, sekarang ini demonstrasi tidak lagi diminati oleh banyak kalangan terutama mahasiswa, hal ini disebabkan karena mahasiswa memiliki banyak persepsi mengenai hal ini, ada yang beranggapan bahwa demonstrasi hanyalah menguntungkan para Koordinator Lapangan (Ketua Pelaksana

Demonstrasi) dengan mendapat bayaran dari pihak lain sehingga mahasiswa yang tergabung hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini terlihat sangat berbeda dengan mahasiswa pada masa Orde Baru dengan rasa idealisme yang tinggi mahasiswa merupakan pelopor dari demonstrasi yaitu ketika jatuhnya rezim Orde Baru dengan kediktatoran penguasa pada masa itu.⁵¹

Kemudian jika dilihat dari pendapat responden tentang efektifitas demonstrasi sebagai salah satu cara menyampaikan hak kebebasan berpendapat atau hak kritik terhadap pemerintah, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL VI
PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP EFEKTIFITAS DEMONSTRASI

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	102	44 %
2.	Kurang efektif	45	19 %
3.	Tidak efektif	60	26 %
4.	Tidak tahu	23	11 %
	Jumlah	230	100%

Dari tabel V diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN mengenai efektifitas demonstrasi adalah sebanyak 102 orang yang berpendapat bahwa demonstrasi dalam menyampaikan pendapat efektif, sedangkan yang

⁵¹ Usman, Mahasiswa UIN (aktivis IPNU), Wawancara, Pekanbaru, 23 April 2009

berpendapat kurang efektif adalah 45 orang, kemudian 60 orang yang berpendapat bahwa demonstrasi tidak efektif dalam menyampaikan pendapat, sedangkan 23 orang yang memilih tidak tahu.

Mahasiswa merupakan intelektual muda yang siap memberikan perubahan kearah yang lebih baik dalam segala bidang, perubahan-perubahan itu akan muncul jika seandainya setiap tindakan yang dilakukan mahasiswa dibarengi rasa idealisme yang tinggi, sehingga sewajarnya mahasiswa menjadi *The agent of chence* orang yang bisa merubah paradigma kearah lebih baik.

Sedangkan jika dilihat dari persepsi mereka tentang keikutsertaan mahasiswa dalam berdemonstrasi, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

TABEL VII
PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP KEIKUT SERTAAN MEREKA
DALAM DEMONSTRASI

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Solidaritas	89	38 %
2.	Karena ikut-ikutan	44	19 %
3.	Karena Perintah senior	65	28 %
4.	Tidak tahu	32	15 %
	Jumlah	230	100%

Dari jawaban responden diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden memilih jawaban sebagai bentuk solidaritas dalam ikut berdemonstrasi yaitu sebanyak

89 orang, semetara jawaban ikut demonstrasi karena perintah senior adalah 65 orang, kemudian jawaban hanya ikut-ikutan berdemonstrasi adalah 44 dan yang memilih jawaban tidak tahu adalah sebanyak 32 orang.

Memang banyak diantara mahasiswa yang ikut dan bergabung dalam demonstrasi merupakan bentuk solidaritas yaitu dengan kesadaran yang tinggi dari masing mahasiswa tersebut, namun juga banyak diantara mahasiwa yang diperintah seniornya sehingga mereka terkesan ikut-ikutan.⁵²

Kemudian jika dilihat dari persepsi responden terhadap demonstrasi sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemerintah berkuasa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL VIII
PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP DEMONSTRASI DALAM
MENYELESAIKAN MASALAH

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Bisa menyelesaikan masalah	54	24 %
2.	Tidak bisa menyelesaikan masalah	72	30 %
3.	Hanya menambah masalah baru	91	40 %
4	Tidak tahu	13	6 %
	Jumlah	230	100%

⁵² Ilham Khuldi, Wawancara, Pekanbaru 9 Mei 2009

Dari pendapat responden diatas dapat diketahui bahwa demonstrasi yang dikakukan hanya menambah masalah baru yaitu sebanyak 91 orang, sementara yang menjawab bahwa demonstrasi tidak bisa menyelesaikan masalah adalah 72 orang, kemudian sebanyak 54 orang menjawab bisa menyelesaikan masalah dan yang memilih jawaban tidak tahu adalah sebanyak 13 orang.

Demokrasi pancasila yang di anut oleh Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, keberagaman merupakan salah satu pemicu terhadap penghormatan hak kebebasan yang dimiliki seseorang, termasuk berdemonstrasi merupakan hak kebebasan berpendapat seseorang. disamping demonstrasi merupakan hak yang dimiliki setiap individu dan memperjuangkannya agar hak itu kembali, tetapi terkadang dampak dari demonstrasi juga bisa mengganggu hak orang lain.

Untuk lebih jelasnya, kita lihat tabel yang dibawah ini:

TABEL IX
PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP DAMPAK DEMONSTRASI

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Baik	99	43 %
2	Kurang Baik	85	36 %
3	Tidak Baik	35	15 %
4	Tidak Tahu	11	6 %
	Jumlah	230	100%

Dari tabel diatas kita bisa melihat Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN Suska Riau berpersepsi bahwa demonstrasi itu adalah baik dengan porsentase 43 % yaitu dengan jumlah persepsi 99 orang sedangkan yang mengatakan kurang baik adalah 85 orang atau 36 % kemudian yang tidak baik adalah sebanyak 35 orang 15 % sedangkan yang memilih tidak tahu adalah 11 orang atau 6 %.

Ditinjau dari segi dampak demonstrasi, hal yang paling sering dirasakan masyarakat adalah seringnya terjadi kemacetan dijalan dikarenakan para demonstrasi mengambil sebahagian badan jalan, namun demikian masyarakat kita umumnya memahami dengan hal tersebut, dengan demikian mereka juga mendapatkan informasi mengenai permasalahan actual yang terjadi ditengah-tengah mereka dan itu merupakan salah satu dampak positif yang dirasakan masyarakat disamping itu mahasiswa juga dilatih untuk bisa berbicara dan mengeluarkan pendapat dimuka umum. disamping juga terdapat demonstrasi yang anarkis sehingga berdampak kepada pengrusakan pasilitas sosial.⁵³

TABEL X

PERSEPSI RESPONDEN TENTANG DEMONSTRASI YANG BAIK

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Porsentase
1	Tertib	85	36 %
2	Kurang Baik	67	29 %
3	Tidak tertib	40	18 %
4	Tidak Tahu	38	17 %

⁵³ Usman, Aktivis IPNU, Wawancara Pekanbaru 23 April 2009

	Jumlah	230	100%
--	--------	-----	------

Dari tabel X diatas dapat diketahui bahwa persepsi responden yang memilih demonatrasi dilakukan secara baik adalah sebanyak 85 orang atau 36 %, kemudian yang memilih demonstrasi kurang baik adalah 67 orang atau sebanyak 29 %, sedangkan 40 orang atau sekitar 18 % berpersepsi tidak baik dan 38 orang responden yang memilih tidak tahu.

Aktivitas berdemonstrasi, unjuk rasa atau perarakan di jalan-jalan, berkumpul di luar bangunan atau kawasan terbuka dengan membawa sepanduk yang merupakan manifestasi dari rasa tidak puas hati berkenaan sesuatu perkara nampaknya semakin mendapat tempat di hati mahasiswa. Secara sepintas lalu, ia menunjukkan sifat prihatin rakyat terhadap isu-isuse masa yang yang menyentuh sensitivitas mereka.⁵⁴

C. Perspektif Fiqh Siyasah

Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN Suska Terhdap demonstrasi diatas merupakan cerminan pendapat merka terhadap perkembangan demonstrasi belakangan ini, persepsi demonstrasi tersebut sesuai dengan tuntunan syari`at, karena dalam melakukan demonstrasi berdasarkan kepada *amar ma`ruf nahi mungkar*.

Dalam Islam memberikan hak kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat kepada seluruh warga negara Islam dengan syarat bahwa hak itu digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan untuk membuat kerusakan dimuka bumi. Konsep

⁵⁴ Ilham Khuldi, wawancara pekanbaru, 9 Mei 2009

Islam tentang kebebasan mengeluarkan pendapat jauh lebih tinggi dari pada hak yang diakui oleh dunia Barat dengan konsep demokrasi mereka (begitu juga di Indonesia).

Memang hak untuk kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum guna menyebarkan kebaikan dan kebajikan bukan hanya semata-mata sebagai hak, tetapi juga sebagai suatu kewajiban. Siapain yang berusaha menyangkal hak ini terhadap rakyatnya secara terang-terangan berarti menentang Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak itu sama dengan hak dan kewajiban individu untuk berusaha menghentikan kejahatan, baik kejahatan yang dilakukan individu ataupun kelompok orang, pemerintah, negara atau pemerintah negara lain. Terhadap hal itu ia harus mengutuk kejahatan secara terbuka dan menunjukan kepada moral yang benar dan harus dilakukan.

Dapat pula dikatakan bahwa dari hak mengeluarkan pendapat ini, yang diberikan oleh Islam hak untuk menentang pemerintahan yang *tirani*, dengan menyampaikan pendapat kita yang benar, sebagaimana firman Allah SWT :

Artinya : *“Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terang-terangan kecuali dilakukan oleh orang yang teraniaya”*⁵⁵

⁵⁵ Depag RI, Alquran dan Terjemahan (Semarang : Toha Putera 1989),, h. 174

Demonstrasi sebagaimana yang disebutkan dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) mengandung dua makna. Pertama: penerangan, peragaan, penunjukan tentang cara kerja sesuatu mesin, keluaran dan lain-lain; Kedua: tunjuk perasaan dengan cara berkumpul beramai-ramai, berarak dan lain-lain. Inilah definisi yang menjadi topik perbincangan kita.⁵⁶

.Daripada definisi itu sendiri, kita dapat fahami bahawa demonstrasi tidak membawa apa-apa konotasi yang negatif, apalagi yang menjurus kepada kesalahan. Demonstrasi pada hakikatnya merupakan salah satu cara untuk menampakkan aspirasi ataupun pendapat (*ta'bir ar-ra'yi*) masyarakat secara berkumpulan.

Namun demikian, apa yang lebih penting bagi kita sebagai umat Islam adalah untuk memandang pengertian demonstrasi dari perspektif Islam. Secara umum, aktivitas menampakkan aspirasi atau pendapat di dalam Islam adalah perkara yang dibolehkan (mubah). Hukumnya sama seperti kita mengungkapkan pandangan atau pendapat tentang suatu perkara, cuma dalam hal ini ia dilakukan oleh sekumpulan orang.

Di dalam pengistilahan bahasa Arab, demonstrasi boleh dibahagikan kepada dua:

1. Demonstrasi Liar : yaitu perbuatan sekumpulan masyarakat di tempat-tempat umum untuk menuntut dan membantah perkara-perkara tertentu yang sudah menjadi tugas negara atau orang yang bertanggungjawab. Di dalam Muzhahaharah ini, para penunjuk perasaan biasanya akan melakukan kerosakan, rusuhan, kemusnahan, membakar harta milik negara, harta umum ataupun harta individu.

56

2. Demonstrasi Aman : yaitu perbuatan sekumpulan masyarakat untuk menyokong, menuntut dan juga membantah sesuatu. Tindakan (Masiirah) ini tidak akan disertai aktivitas merusakkan, menghancurkan atau membakar harta benda negara, awam atau individu. Para penunjuk perasaan akan sentiasa memerhatikan dan mematuhi hukum-hukum syara', nilai-nilai Islam dan kemaslahatan umat Islam. Mereka juga akan sentiasa menjaga adab-adab sebagai orang Islam.

Dalam pandangan atau persepsi responden diatas, bahwa demosntrasi yang dilakukan adalah kebanyakan bertujuan untuk menegakkan kebaikan *amar ma`ruf dan nahi mungkar*, disamping untuk menjaga hak seseorang untuk tidak diganggu oleh orang lain. Hal tersebut bisa dijadikan alasan bahwa demonstrasi yang bersifat *amar ma`ruf dan nahi mungkar* merupakan termasuk dalam demonstrasi aman (*masiirah*) dan hal tersebut dianjurkan didalam Islam.

Tata cara penyampaian pendapat menurut siyasah Islam *amar bi ma`ruf nahi anil mungkar*, dapat dilakukan dalam tiga tahap :

1. dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik (tangan/ kekuasaan) dalam pengertia kekuasaan untuk merubah keadaan tersebut, sehingga masyarakat menjadi baik dan tentram kembali.
2. apabila ia tidak memiliki kekuasaan tersebut, dilakukan dengan menggunakan ucapan lisan atau tulisan.

3. apabila juga tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk melakukan secara lisan atau tulisan, ia harus menyatakan kebencian didalam hatinya dengan jalan mengisolasi diri dan tidak ikut serta terhadap keadaan yang mungkar tersebut.⁵⁷

Dalam menyampaikan pendapat dan pandangan Siyasa Islam harus dengan sopan, tidak dengan kata-kata yang keji. Sebab Allah tidak menyukai ucapan yang buruk (mencaci maki orang, menerangkan keburukan orang lain, menyinggung perasaan orang lain, dan sebagainya) dengan terus terang kecuali terhadap orang yang dianiaya. Karenanya, seseorang yang menggunakan hak kebebasan berpendapat untuk membimbing dan mengajak ummat kejalan yang benar, harus dengan jalan yang bijaksana. Artinya untuk menyerukan pendapat yang benar haruslah pula diiringi dengan cara yang baik dan benar pula, sehingga yang mendengar pendapat kita mau mengikuti apa yang kita kemukakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN Suska Riau terhadap pelaksanaan demonstrasi sebagai mekanisme menyampaikan pendapat (kritikan, saran, dukungan dll) adalah sebagai berikut :

⁵⁷ Abdul Qadir al Jailani, *Negara ideal menurut Konsep Islam* (Surabaya : Bina Ilmu 1995)h. 153-156

1. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap yang mungkar *Ingkarul mungkar*, yaitu demonstrasi yang dilakukan kebanyakan bertujuan untuk menegakkan kebaikan dan kebajikan disamping untuk mengembalikan hak-hak yang dirugikan oleh orang lain terutama pemerintah.
2. Demonstrasi dasar hukumnya adalah *mubah* (boleh), dan hukum demonstrasi tersebut bisa berubah dengan melihat kondisi yang terjadi. Jika demonstrasi untuk memperjuangkan hak yang dirampas sekaligus menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan tergolong Demonstrasi Aman, maka hukumnya boleh dan bahkan wajib. Tetapi jika demonstrasi bertujuan untuk anarkisme merusak fasilitas sosial dan tergolong kepada Demonstrasi Liar, maka hukumnya adalah haram.

B. Saran-saran

Dari analisa dan kesimpulan diatas, maka dapatlah penulis berikan beberapa saran kepada para demonstan yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi dalam menggunakan hak kritik terhadap pemerintah, antara lain:

1. Agar demonstrasi yang dilakukan dan menjadi ciri dari perjuangan mahasiswa bisa dipertahankan, maka hendaknya para aktivis perjuangan reformasi yang menyuarakan aspirasi hendaknya mempertahankan idealisme mahasiswa yang dimiliki, karena idealisme tersebut merupakan martabat mahasiswa yang mesti dijaga, ketika idealisme bisa diganti dengan rupiah atau harta benda, maka *legitimasi* seorang mahasiswa akan hilang, yang muncul adalah *ilegitimasi* atau saling tidak percaya, mahasiswa sudah tidak percaya kepada mahasiswa, rakyat sudah tidak percaya kepada mahasiswa, pemerintah juga sudah tidak percaya

- kepada mahasiswa dan sebaliknya. Yang justru terjadi adalah krisis kepercayaan satu sama lain yang mengakibatkan timbulnya akar permasalahan yang ada.
2. Aktivis adalah orang yang siap berjuang ketika hak orang lain dirampas, dan aktivis merupakan lokomotif pergerakan dari perjuangan tersebut, oleh karena itu, konsisten didalam berjuang tanpa mengharapkan imbalan dan pasilitas merupakan keniscayaan, dan hendaknya semua perjuangan-perjuangan tersebut agar dilakukan dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan ridho dari Allah SWT, agar bermamfaat untuk didunia dan akhirat.
 3. Para mahasiwa yang memiliki persepsi, bahwa demonstrasi hanya untuk untuk pamer para kativis, demonstrasi telah ditunggangi pihak ketiga dan yang menikmati hasil adalah para senior atau yang Korlap (koordinator lapangan) saja, dan sebagainya, hedaklah dibuang jauh-jauh persepsi tersebut, karena akibat yang ditimbulkan adalah timpulnya *apatisme* (keenggan mahasiswa untuk tidak berbicara dan menuruti kebijakan-kebijakan yang ada walaupun itu mengekang mahasiswa atau rakyat sendiri).
 4. Perjuangan menuju perubahan belum selesai, ada banyak hal yang mesti dirubah dengan tangan pemuda/ mahasiswa. Ingatlah perubahan itu berawal dari aktivis – aktivis pemuda, tidak ada dalam sejarah yang tua bisa merubah sesuatu secara radikal. Pemudalah yang siap untuk itu dan mengibarkan bendera merah putih di negara lain. Ketika tidak adalagi perubahan dan terobosan baru dari pemuda berupa inovasi pemikiran dan berbagai karya, maka besar kemungkinan tidak ada kemakmuran yang akan dicapai sebagaimana yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang –Undang Dasar 1945 yang menjadi tujuan kita bernegara.

Demikianlah penelitian ini penulis buat, semoga menjadi informasi dan karangan yang bermamfaat terhadap aktivis-aktivis mahasiswa sebagai landasan bergerak dan berjuang kerarah yang lebih baik. Semoga karangan ini berguna bagi para pembaca keseluruhan, dan didalam penelitian ini banyak terdapat kekurangan, kritikan dan saran berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penelitian –penelitian dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT tetap meridhoi dan menjadi amal ibadah apa yang dikerjakan hamba-hambanya.

Amin yarabbal`alamin.

Wallauhuwafiq ila aqwamitthariq.

DAFTAR PUSTAKA

1. Nasution Harun, *Islam di Tinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta : UI Press, 1978),

Cet 1

2. Rum Muhammad, *Strategi Perang Salib*, Majalah SABILI (Jakarta, Edisi No. 14 Th. X130 Januari 2004)
3. Qardhawi Yusuf, *Fiqh Negara*, terj. Syafril Halim (Jakarta ; Rabbani Press. 1997)
4. Oloan Yuristinus, Haryono, Sebastian Salang,. *Rumah Aspirasi*, (Jakarta; KPRA-DPD RI, 2007)
5. Abdussalam, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum* (Jakarta; Restu Agung, 2006) cet. 1
6. Salim Yenny, Salim Peter, *kamus bahasa Indonesia kontenporer*, (Jakarta : modern English prees, 1991), cet.I.
7. Wasito, W Tito, Wasito Wojo , *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, (Bandung: Penerbit HASTA, 1980), Cet. X. h. 43
8. Rusli Mantara Wawancara Penulis Tanggal 4 September 2008
9. Poerwadaminta WJS, Wasito Wojo S, , *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris*, (Jakarta; Hasta)

¹ K. Prent CM, Drs. J. Adisubrata, Drs. WJS. Poerwadaminta, *Kamus Latin Indonesia*, Jakarta : TT, hal. 47

¹ Ilham Khuldi, (Aktifis HMI UIN suska Riau) wawancara ,Pekanbaru, tgl 9 Mei 2009

¹ Two Bagus PP, aktivis UIN Suska (Ketua Umum BM1R) wawancara, Pekanbaru, 15 April 2009

¹ Usman, Mahasiswa UIN (aktivis IPNU), Wawancara, Pekanbaru, 23 April 2009

¹ Ilham Khuldi, Wawancara, Pekanbaru 9 Mei 2009

¹ Usman, Mahasiswa UIN Suska (Aktivis IPNU, Wawancara Pekanbaru 23 April 2009

- ¹ Ilham Khuldi, wawancara pekanbaru, 9 Mei 2009
- ¹ Depag RI, Alquran dan Terjemahan (Semarang : Toha Putera 1989),, h. 174
- ¹ Abdul Qadir al Jailani, *Negara ideal menurut Konsep Islam* (Surabaya : Bina Ilmu 1995)h. 153-156
- ¹ Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, Pasal 1, Butir 1. dalam hal ini penulis mengutip dalam buku Abdussalam Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Hal. 25
- ¹ *Ibid* Hal. 26
- ¹ Aus Hidayat Nur, *Fiqh Demonstrasi Kajian Hukum dan Urgensi Unjuk Rasa Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Pustaka Tarbiyatuna 2002) Cet I, Hal, 6
- ¹ Inu Kencana Syafi'i, *Alqur'an dan Ilmu Politik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000) Cet. 2 hal. 258
- ¹ Ilham Gunawan, *Kamus Politik Internasional*, (Jakarta: PT Restu Agung, 1999) H. 258
- ¹ Sri Sumantri Marto Suwijnjo, *Pengantar Perbandingan antar Hukum Tata Negara*, (Jakarta : CV. Raja Wali 2001) h. 25
- ¹ Ismail Yusanto, *Islam Idiologi* (Jawa Timur : Al-izzah, 2004) h. 102
- ¹ Abdussalam, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum* (Jakarta;Restu Agung,2006) cet. 1 hal. 60
- ¹ Munandar Suleman, *Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT Eresxo, 1990) Cet VI hal. 68
- ¹ *Op Cit.* Abdussalam, h.2-7
- ¹ *Ibid* : abdussalam Hal. 289
- ¹ *Ibid*, :Abdusalam Hal. 287
- ¹ Aus Hidayat, *Fiqh Demonstrasi kajian Hukum dan Urgensi Unjuk Rasa dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Pustaka Tarbiyatuna 2002) cet I hal. 6
- ¹ *Ibid* hal. 5
- ¹ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahan* , (Semarang: CV Toha Putera) Cet. Hal 929

- ¹ Aus Hidayat Nur, *op-cit* h. 60
- ¹ Depag RI, *op-cit* h. 60
- ¹ *Ibid* h. 85
- ¹ Aus Hidayat Nur, *op-cit* h. 10
- ¹ Abdul Mudjid , *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia), 1996 cet. 11 h. 10-11
- ¹ Aus Hidayat, *opcit* h. 15
- ¹ Abdussalam Bin Barjas al Abdul Karim, *Etika Mengkritik Penguasa*, (Surabaya; Pustaka Assunnah , 2002) cet. 1 h. 27-28
- ¹ Undang-undang serikat buruh tahun 2000 dan Undang-undang tentang unjuk rasa, (Bandung : Citra Umbara) h. 136-137
- ¹ *Ibid* h. 140
- ¹ Ibnu Taimiyah , *Etika Beramal Ma`ruf nahi mungkar*, (Jakarta; Gema Insani Press) 1995, cet IV hal. 18
- ¹ *Ibid* h. 28
- ¹ Yusuf Qardawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Quran dan Sunnah*, (Jakarta; Pustaka Al Kuasar) 1997 Cet. 1 h. 169-170
- ¹ *Ibid* h. 168
- ¹ Diaduddin Rais, *Teori Politik Islam* , (Jakarta; Gema Insani Press) 2001 cet. I hal. 259
- ¹ Abdussalam bin Barjas, *op cit* h. 71-72

DAFTAR PERTANYAAN ANGKET

1. Apakah anda mengenal atau mengetahui istilah demonstrasi?
 - a. sangat kenal

- b. kurang kenal
 - c. tidak kenal
 - d. tidak tahu
2. Apakah anda pernah bergabung dalam aksi demonstrasi?
- a. selalu
 - b. sering
 - c. jarang
 - d. tidak pernah
3. Apa alasan anda ikut bergabung dalam aksi demonsatrasi?
- a. karena keinginan sendiri
 - b. karena perintah senior
 - c. karena ikut-ikutan
 - d. tidak tau
4. Menurut anda, apakah factor dominan yang mempengaruhi terjadinya demonstrasi dari rakyat?
- a. Karena ketidak berpihakan Pemerintah kepada rakyat
 - b. Karena kurang berpihakan pemerintah kepada rakyat
 - c. Karena kasus-kasus tertentu (korupsi, dictator dll)
 - d. Tidak tahu
5. Menurut anda, apakah demonstrasi sebagai mekasisme dalam menyampaikan pendapat atau kritikan terhadap pemerintah tergolong efektif?
- a. Sangat efektif
 - b. Efektif

- c. Tidak efektif
 - d. Tidak tahu
6. Menurut anda, manakah tempat yang sering menjadi sasaran dari demonstrasi rakyat?
- a. Pihak eksekutif (PemProv/ Pemko)
 - b. Pihak Legislatif (DPRD)
 - c. Pihak Yudikatif (Penegak Hukum)
 - d. Tidak tahu
7. Menurut anda, dari kalangan manakah yang sering melakukan demonstrasi?
- a. Dari kalangan mahasiswa/ pelajar
 - b. Dari kalangan organisasi-organisasi tertentu
 - c. Dari kalangan masyarakat biasa
 - d. Tidak tau
8. Menurut anda, dari kalangan manakah yang sering memelopori aksi demonstrasi terhadap pemerintah?
- a. Dari kalangan mahasiswa/pelajar
 - b. Dari kalangan organisasi-organisasi tertentu
 - c. Dari kangan rakyat biasa
 - d. Tidak tahu
9. Apakah aksi demonstrasi rakyat tersebut sesuai dengan asas demokrasi yang kita anut?
- a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai

- c. Tidak sesuai
 - d. Sangat sesuai
 - e. Tidak tahu
10. Bagaimana menurut anda, apakah demonstrasi rakyat tersebut seluruhnya murni memperjuangkan aspirasi rakyat?
- a. Seluruhnya memperjuangkan aspirasi rakyat
 - b. Hanya sebagian kecil saja yang memperjuangkan
 - c. Tidak ada perjuangan aspirasi rakyat
 - d. Tidak tahu.
11. Bagaimana menurut anda, apakah demonstrasi tersebut terdapat unsure-unsur kepentingan dari pihak-pihak tertentu?
- a. Tidak ada unsure kepentingan didalamnya
 - b. Hanya sebagian kecil saja terdapat unsure kepentingan
 - c. Tidak ada terdapat kepentingan
 - d. Tidak tahu
12. Apakah menurut anda, ketika para demonstiran melakukan demonstrasi terhadap pemerintah mereka mendapat tekanan dari pemerintah itu tersendiri?
- a. Demonstiran sering mendapat tekanan pemerintah
 - b. Demonstiran jarang mendapatkan tekanan dari pemerintah
 - c. Demonstiran tidak mendapatkan tekanan dari pemerintah
 - d. Tidak tahu
13. Apa yang anda rasakan ketika melihat para demonstiran dalam menyampaikan aspirasi masyarakat?

- a. Sangat puas dan bangga
- b. Puas dan bangga
- c. Tidak puas dan bangga
- d. Sama sekali tidak puas dan bangga
- e. Tidak tahu

14. Apa yang anda rasakan ketika anda ikut melakukan demonstrasi?

- a. Sangat puas dan bangga
- b. Puas dan bangga
- c. Tidak puas dan bangga
- d. Sama sekali tidak puas dan bangga
- e. Tidak tahu

15. Jika anda ingin menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah jalan apa yang akan anda tempuh?

- a. Melalui demonstrasi
- b. Mendatangi wakil rakyat/ DPRD
- c. Menjumpai langsung pihak pemerintah
- d. Tidak tahu

16. Apakah menurut anda, efek yang ditimbulkan dari aksi demonstrasi akan berpengaruh kepada stabilitas politik, ekonomi, citra pemerintahan, dll?

- a. Sangat berpengaruh
- b. Berpengaruh
- c. Tidak berpengaruh
- d. Sangat tidak berpengaruh

- e. Tidak tahu
17. Menurut anda, efek manakah yang lebih dominan ditimbulkan dari akibat demonstrasi?
- a. Efek positif lebih dominan
 - b. Sama-sama antara positif dengan negatif
 - c. Efek negatif lebih dominan
 - d. Tidak tahu
18. Menurut anda, apakah aksi demonstrasi di bolehkan dalam agama Islam?
- a. Dbolehkan
 - b. Tidak dibolehkan
 - c. Tidak tahu
19. Anda setuju dengan demonstrasi?
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
 - e. Tidak tahu

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana menurut anda akurasi dari demonstrasi dalam mengkritisi pemerintah?
2. Apakah demonstrasi tergolong sopan dalam mengkritisi pemerintah?

3. Bagaimana pandangan anda terhadap para demontran yang melakukan anarkisme dan merusak sarana dan prasarana umum?
4. Bagaimana seharusnya hokum mengatur para demontran?
5. Harapan anda kepada demontran?

BAB II

TINJAUAN TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat UIN Suska Riau

Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau merupakan hasil pengembangan atau peningkatan status pendidikan dari Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru yang secara resmi dikukuhkan berdasarkan peraturan presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 Tanggal 4 Januari Tahun 2005 oleh Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Tindak lanjut perubahan status ini, menteri Agama RI menetapkan Organisasi dan Tatakerja UIN Suska Riau berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2005 tanggal 4 April 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Adapun Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim (IAIN Susqa) Pekanbaru, didirikan pada tanggal 19 September 1970 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 194 Tahun 1970. Institut ini diresmikan berdirinya oleh menteri Agama Republik Indonesia K.H Ahamad Dahlan pada tanggal 19 September 1970 berupa penandatanganan piagam dan pelantikan Rektor yang pertama, Prof. H. Ilyas Muhammad Ali.

IAIN ini pada mulanya berasal dari beberapa Fakultas dari Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang kemudian dinegerikan, yaitu Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Riau di Pekanbaru, Fakultas Syari`ah Universitas Islam Riau di Tembilahan, dan Fakultas Ushuluddin Mesjid Agung An-Nur Pekanbaru.

Dengan persetujuan Pemerintah Daerah, maka Institut Agama Islam Negeri Pekanbaru diberi nama dengan Sulthan Syarif Qasim , yaitu nama Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura ke-12 atau yang terakhir yang juga nama pejuang Nasional asal Riau. Pengambilan nama ini mengingat jasa-jasa dan pengabdian beliau terhadap negeri, termasuk dibidang pendidikan.

Ketika didirikan, IAIN Susqa hanya terdiri atas tiga Fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari`ah, dan Fakultas Ushuluddin. Namun semenjak tahun 1998/1999, IAIN Suska telah pula mengembangkan diri dengan membuka Fakultas Dakwah. Fakultas ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 104 tahun 1998 tanggal 24 Februari 1998. fakultas ini pada mulanya berasal dari Jurusan Dakwah yang ada di Fakultas Ushuluddin.

Keinginan untuk memperluas kajian di IAIN Sutan Syarif Qasim Pekanbaru muncul melalui seminar cendikiawan muslim (1985) Seminar Budaya Kerja dalam Perspektif Islam (1987), dan dialog ulama serta cendikiawan se-Propinsi Riau tiga tahun berturut-turut (1996, 1997,1998) melahirkan rekomendasi : agar IAIN Sultahn Sarif Qasim Pekanbaru membuka program studi baru (umum). Melalui keputusan rapat senat IAIN Susqa tanggal 9 September 1998 yang menetapkan perubahan status IAIN Susqa menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, maka dilakukan persiapan secara bertahap. Mulai pada tahun akademik 1998/1999 telah dibuka beberapa jurusan atau program studi umum pada beberapa Fakultas, seperti jurusan Psikologi pada Fakultas Tarbiyah, jurusan Manajemen dan Manajemen Perusahaan pada Fakultas Syari`ah dan jurusan Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dak`wah. Pada tahun akademik 1999/2000 IAIN telah pula membuka Jurusan /

Program Studi Teknik Informatika. Satu tahun kemudian, tepatnya tahun akademik 2000 /2001, dibuka pula program studi Teknik Industri . kedua jurusan program studi terakhir ini untuk sementara ditempatkan dibawah administrasi Fakultas Dakwah.

Pada tahun 2002/2003 jurusan-jurusan program studi umum yang ada pada Fakultas diatas ditambah beberapa program studi baru, ditingkatkan menjadi Fakultas yang berdiri sendiri. Fakultas –fakultas tersebut adalah Fakultas Sains dan Teknologi dengan jurusan / Program Studi Tehknik Informatika, Tehknik Industri, Sistem Informasi, dan Matimatika Terapan; Fakultas Psikologi dengan jurusan Psikologi; Fakultas Ekonomi dengan Jurusan /Program Studi Menejemen, Akuntansi dan Menajemn Perusahaan Diploma III ; dan Fakultas Peternakan dengan Jurusan Ilmu Produksi Ternak yang terdiri atas Program Studi Teknologi Produksi Ternak dan Teknologi Hasil Ternak.

Dengan demikian , pada tahun akademik 2002/2003, IAIN Susqa sebagai persiapan UIN Riau elah mempunyai 8 Fakultas , yaitu : Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari`ah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Peternakan.

Peningkatan status IAIN menjadi UIN dimaksudkan untuk menghasilkan sarjana muslim yang mampu menguasai , mengembangkan, dan menerapkan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi secara integral, sekaligus menghilangkan padangan dikhotomi.

Pengembangan UIN Suska ini tidak hanya pada bidang akademk semata, seperti melalui pembukaan Fakultas-fakultas dan program-program studi baru, tapi juga diarahkan pada pengembangan fisik, sarana, dan prasarana. Dewasa ini UIN Suska

telah mempunyai lahan kampus seluas 78,25 Ha yang terdiri atas 3,65 Ha di jalan K.H Ahmad Dahlan dan 74, 50 Ha di Km. 15 Jl. Soebrantas.

Dewasa ini UIN Suska telah memiliki bangunan gedung seluas 13.080 m² yang terdiri atas 7.320 m² di kampus “ Tuanku Tambusai” dan 5.760 m² di kampus II di Jl. Soebrantas Km. 14,5 yang disebut juga dengan kampus “Raja Ali Haji”. Bangunan tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara seluas 11.595 m². pembangunan fisik di kampus Raja Ali Haji gencar dilakukan, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi dan Kabupaten Kota, perusahaan swasta, maupun bantuan berbagai pihak lainnya, yang terdiri atas gedung perkuliahan, gedung perkantoran, gedung pusat kegiatan mahasiswa, gedung laboratorium dan sebayanya.

B. Visi, Misi dan Karakteristik UIN Suska Riau

1. Visi

Visi UIN adalah mewujudkan Universitas Islam Negeri sebagai lembaga pendidikan tinggi utama yang mengembangkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara integral di kawasan Asia Tenggara Tahun 2013.

2. Misi

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumberdaya manusia yang berkualitas secara akademik dan profesional serta memiliki integritas pribadi sebagai sarjana muslim.
- b. Melaksanakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan menggunakan paradigma Islam.

- c. Memamfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan paradigma Islami.
 - d. Menyiapkan sumberdaya manusia serta sarana, dan prasarana untuk menunjang kelancaran elaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Karakteristik
- a. Mengembangkan berbagai cabang imu pengetahuan dengan pendekatan relijius sehingga nilai-nilai Islam menjadi roh bagi stiap cabang ilmu pengetahuan.
 - b. Pangembangan paradigma ilmu yang memberi penekanan pada rasa iman dan tauhid
 - c. Penyelenggaraan beberapa disiplin ilmu keislaman yang memperkuat domain akidah, ibadah, ahklak dan muamalah Islamiyah, dan penerapan prinsip Islam dalam disiplin ilmu (IDI) sebagai upaya riil mewujudkan integrasi ilmu dengan Islam.
 - d. Pembinaan dan pengembangan lingkungan yang madani sesuai dengan nilai-nilai Islam.
 - e. Perwujudan keunggulan akademik dan propfesionalisme yang didasarkan pada moral keagamaan dalam kehidupan kampus dikalangan civitas akademika.
 - f. Mengembangkan studi Regional Islam Asia Tenggara dan Tamaddun Melayu sebagai pola ilmiah pokok.

C. Tujuan Pendidikan

1. Tujuan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 Bab II Pasal 2 ayat 1, tujuan pendidikan tinggi adalah:

- a. Menyiapkan peserta didik, menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian.
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaan atau peningkatan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

2. Tujuan Pendidikan UIN

Sebagai lembaga Pendidikan Tinggi, maka tujuan pendidikan UIN Suska adalah:

- a. Menyiapkan peserta didik yang berakhlak mulia menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan keunggulan akademik, dan atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu agama Islam, teknologi, seni dan ilmu lain yang terkait.
- b. Menggali, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama Islam teknologi, seni dan ilmu lain yang terkait serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan martabat dan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional.

3. Tujuan Pendidikan Menurut Program

- a. Tujuan pendidikan Program Diploma adalah menghasilkan warga Negara berkualitas sebagai berikut :

- 1). Berjiwa pancasila dan memiliki integritas dan kepribadian yang tinggi.
- 2). Taat beribadah dan berakhlak mulia.
- 3). Bersikap terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang keahliannya.
- 4). Mempunyai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya ke dalam kegiatan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.
- 5). Mempunyai kemampuan untuk mengikuti pengembangan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya

- b. Tujuan Pendidikan Program Sarjana (S.1) adalah menghasilkan warga Negara yang berkualitas sebagai berikut:

- 1). Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas serta kepribadian yang tinggi.
- 2). Taat beribadah dan berakhlak mulia
- 3). Bersikap terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang keahliannya.
- 4). Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara utuh dan baik sebagai produk maupun metode dan proses sebagai keahlian umum.

- 5). Memahami secara mendalam dan memiliki keahlian serta keterampilan untuk bekerja secara professional dalam salah satu bidang ilmu pengetahuan Agama Islam, atau seperangkat cabang yang diperlukan untuk mnerjemahkan nilai-nilai ilmu agama Islam untuk diperlukan dalam pembangunan masyarakat dan pengembangan ilmu agama Islam.
- c. Tujuan Pendidikan Program Magister (S.2) adalah menghasilkan warga Negara berkualitas sebagai berikut:
- 1). Berjiwa Pancasila dan memiliki kepribadian dan intergritas yang tinggi.
 - 2). Taat beribadah dan berahklak mulia.
 - 3). Bersikap terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang keahliannya.
 - 4). Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian secara terbats dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu berperan serta memecahkan persoalan masyarakat.
 - 5). Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian yang mendalam dan mandiri terhadap masalah-masalah sosial dan teknologi, menghasilkan karya yang berbobot ilmiah dan menyelesaikan persoalan masyarakat maupun mengembangkan ilmu pengetahuan Islam.¹

¹ Buku Panduan dan Informasi Akademik Tahun Akadenik 2006/2007, Departeman Agama UIN Suska Riau 2006

D. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan suatu untuk melaksanakan kegiatan mahasiswa dalam bidang eksekutif dan manajerial/leadership.

1. Struktur

Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Ketua
- b. Wakil ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Ketua-ketua bidang sesuai kebutuhan

2. Tugas dan Fungsi

Adapun tugas dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua program kerja yang telah ditetapkan garis-garis besar program kerja (GBPK).
- b. Merencanakan dan melakukan koordinasi program kegiatan kemahasiswaan.

Adapun fungsi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah sebagai berikut:

- a. Eksekusi / pelaksana aspirasi mahasiswa (*student aspiration service*)
- b. Manajerial / leadership

3. Hak dan Tanggung Jawab

- a. Pengurus BEM mempunyai hak :

- 1). Menyampaikan pendapat usul dan saran kepada Pimpinan Universitas /
Akademi dan bagi BEM tingkat Fakultas dan Jurusan Bertanggung jawab
kepada tingkatan masing-masing.
 - 2). Mendapat pembinaan, pembimbingan dan pendampingan dan pembina.
- b. BEM Universitas Bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Rektor dan
BEM Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.
 - c. BEM bertanggung jawab secara fungsional BLM serta mahasiswa yang
mekanismenya diatur oleh BLM dan BEM.²

² [Http: Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas \(BEMFA\)@ Geoggle.com](http://Badan%20Eksekutif%20Mahasiswa%20Fakultas%20(BEMFA)%20Geoggle.com)

BAB III

TINJAUAN UMUM DEMONSTRASI

A. Pengertian Demonstrasi

Dalam istilah bahasa arab untuk demonstrasi (unjuk rasa) adalah, *muzhahara*, secara bahasa berasal dari kata *dhahara* yang artinya memperlihatkan, menunjukkan atau memenangkan.¹

Sementara didalam undang-undang dikatakan bahwa demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum.² Selanjutnya kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³

Penulis melihat antara demonstrasi dan kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan suatu ungkapan yang berbeda tetapi memiliki tendensi keduanya ungkapan tersebut tersebut sama yaitu menyampaikan buah pikiran apakah itu nasehat, kritikan, saran, kecaman maupun penilaian-penilaian terhadap suatu

¹ Aus Hidayat Nur, *Fiqh Demonstrasi Kajian Hukum dan Urgensi Unjuk Rasa Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Pustaka Tarbiaytuna 2002) Cet I, Hal, 6

² Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka umum, Pasal 1, Butir 1. dalam hal ini penulis mengutip dalam buku Abdussalam Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Hal. 25

³ *Ibid* Hal. 26

kebijakan, dalam hal ini kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang berkuasa. Oleh karenanya menyampaikan pendapat sangat dijamin dalam sistem demokrasi.

Demokrasi diambil dari bahasa Yunani, yang secara etimologi “*demos*” dan “*Cratein*”. *Demos* adalah rakyat atau penduduk suatu daerah, sedangkan *cratein* adalah kekuasaan atau kedaulatan. Dari kedua kata tersebut lahirlah sebuah kata demokrasi yang berarti sistem pemerintahan suatu negara yang kedaulatannya berada ditangan rakyat.⁴ Dapat juga dikatakan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat.⁵ Sedangkan didalam dunia modern demokrasi diartikan dengan suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*).⁶

Jadi negara demokrasi adalah suatu negara / *state* yang mana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, rakyat berperan aktif dalam suatu Negara yang ikut serta dalam menerapkan kebijakan-kebijakan Negara tersebut.

Dalam suatu Negara demokrasi sangat dijunjung tinggi kebebasan berpendapat, karena kebebasan berpendapat tersebut merupakan suatu indikasi dari Negara demokrasi, dan hal tersebut sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam pemerintahan Negara yang bersangkutan. Rakyat diikut sertakan dalam pengambilan keputusan, karena dalam suatu Negara demokrasi, pengambilan keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat, disinilah hak rakyat untuk memberikan suara,

⁴ Inu Kencana Syafi'i, *Alqur'an dan Ilmu Politik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000) Cet. 2 hal. 258

⁵ Ilham Gunawan, *Kamus Politik Internasional*, (Jakarta: PT Restu Agung, 1999) cet. I H. 258

⁶ Sri Sumantri Marto Suwiknjo, *Pengantar Perbandingan antar Hukum Tata Negara*, (Jakarta : CV. Raja Wali 2001)cet. I h. 25

saran-saran, tanggapan-tanggapan apakah secara langsung (system demokrasi langsung) ataupun secara perwakilan (system demokrasi klasik).⁷

Semenjak tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah diterapkan beberapa bentuk demokrasi seperti demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan demokrasi pancasila hingga saat ini. Sehingga demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah Negara yang sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Hal ini terbukti dalam aturan kenegaraan maupun Undang-Undang Dasar sebagai suatu landasan konstitusional terdapat pembahasan yang cukup mendetail tentang kebebasan berekspresi tersebut.

Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan menyatakan kehendak merupakan salah satu hak dasar dari warga Negara dan diakui serta dijamin oleh undang-undang. Kebebasan yang menyatakan pendapat, terutama dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi atau pengarahannya perlu diatur agar tidak melanggar kebebasan orang lain dan tidak menimbulkan akses yang merugikan kepentingan publik. Penyampaian pendapat di muka umum adalah refleksi dari suatu kecenderungan atau fenomena yang dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial.⁸

Masalah kebebasan individu dalam demokrasi, maka kebebasan mengeluarkan pendapat atau demonstrasi bukannya hanya sekedar bebas berpendapat dan berbuat, melainkan harus pula disertai dengan tanggung jawab yang besar atas penggunaan kebebasan tersebut.

⁷ Ismail Yusanto, *Islam Idiologi* (Jawa Timur : Al-izzah, 2004) Cet. I h. 102

⁸ Abdussalam, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum* (Jakarta; Restu Agung, 2006) cet. 1 hal. 60

Hal ini sesuai dengan tendensi utama demokrasi pancasila sebagai suatu system pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat, rakyatlah yang menentukan bentuk dan isi pemerintahan yang dikehendaknya sesuai dengan hati nuraninya. Dalam hal ini, sudah sewajarnya kepada kepentingan rakyat banyak dalam rangka tercapinya kemakmuran yang merata.

Secara psikologis individu dan Negara (nation) memiliki hubungan yang cukup erat dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Menurut Ernest Renan, Nation adalah suatu jiwa, suatu asas spiritual suatu solidaritas yang besar yang berbentuk oleh perasaan yang timbul akibat pengorbanan-pengorbanan yang dibuat dan dalam masa depan hal tersebut dapat dibuat lagi. Relasi individu dan nation tercermin pula dalam bentuk peranan-peranan yang ada dalam diri individu itu sendiri yang terampung dalam unit-unit lingkungan social yang lebih makro. Hubungan langsung individu dan nation diekspresikan melalui posisinya sebagai warga Negara.⁹ Pernyataan diatas merupakan suatu gambaran yang nyata tentang relasi individu dan Negara. Dimana pribadi seseorang warga Negara sangat erat hubungannya dengan Negara yang bersangkutan.

⁹ Munandar Suleman, *Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT Eresxo, 1990) Cet VI hal. 68

B. Sejarah Demonstrasi di Indonesia

Didalam sistem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia, demonstrasi merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh manusia sehingga mendapat perlindungan hukum dari Negara. Hal ini terdapat dalam pasal 28 undang-undang Dasar 1945 “Kemerdekaan menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan diatur sepenuhnya dalam undang-undang”.

Sejak tahun 1995, masih dalam pemerintahan Presiden RI Soeharto pada masa periode 1993-1998, kemerdekaan berfikir dan berbicara semakin marak dan merebah dengan bentuk konkrit yaitu mengadakan demonstrasi, unjukrasa, pawai, rapat-rapat, seminar dan mimbar bebas. Unjuk rasa, demonstrasi dan pawai dilakukan oleh para pekerja perusahaan industri dalam menuntut hak-hak normative dengan tuntutan agar pengusaha dan pemerintah memenuhi tuntutan, antara lain Upah Minimum Regional (UMR) dan hak normative lainnya yang dipelopori oleh LSM, dan mahasiswa.

Rapat-rapat, seminar-seminar, dan mimbar bebas yang dilakukan oleh para LSM-LSM, petisi 50, para intelektual dengan fokus pembicaraan mengenai kepemimpinan nasional periode tahun 1998-2003, menyarankan agar Presiden Soeharto tidak mencalonkan diri lagi dan lebih baik mengundurkan diri. Mereka juga menganalisis kebijakan politik dan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah Presiden RI Soeharto yang lebih mengutamakan alat kepentingan kekuasaan dan konglomerat atau pengusaha-pengusaha yang dekat dengan kekuasaan, serta menyoroti kepemimpinan Golkar agar kepemimpinan nasional periode 1998-2003 tetap berada di tangan Presiden Soeharto. Dalam menghadapi perkara kemerdekaan berpikir dan berbicara seperti bentuk konkrit tersebut, pemerintah tidak lagi mengedepankan tindakan

hukum secara adil, tetapi telah menggunakan hukum sebagai alat untuk menghadapi lawan-lawan politiknya. Dengan menggunakan hukum, pemerintah seakan-akan telah menciptakan pemerintahan yang demokratis.

Dengan semakin maraknya gejala penyampaian pendapat dimuka umum dalam bentuk demonstrasi, mimbar bebas dan lain sebagainya pada tahun 1995, maka masalah penyampaian pendapat dimuka umum menjadi masalah social politik yang harus disikapi oleh pemerintah pada saat itu. Sikap pemerintah yang dominan mengarah kepada pemamfaatan hukum demi menstabilkan kekuasaan dan lawan politik.

Pada masa transisi Pemilu tahun 1997 dan siding umum MPR tahun 1998, Negara Indonesia menghadapi krisis moneter dan sekaligus krisis ekonomi. Dalam pemilu tahun 1997, Golkar berupaya untuk mendapatkan kemenangan mayoritas dan berhasil memenangkan Pemilu 1997 dengan mayoritas. Atas permintaan para pengurus partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengangkat Soeharto menjadi Presiden dalam periode tahun 1998-2003. Presiden RI Soeharto bersedia diangkat kembali. Presiden diminta juga untuk memulihkan krisis moneter dan krisis ekonomi yang dihadapi Negara Indonesia.

Usaha Golkar tidak sia-sia dan dalam sidang MPR, Soeharto dan BJ Habibie dipilih dan dilantik menjadi Presiden RI dan Wakil Presiden RI periode 1998-2003. presiden RI segera membentuk kabinet dan melantik kabinet serta mengeluarkan kebijaksanaan untuk mengatasi krisis moneter dan krisis ekonomi antara lain gaji Presiden sampai Esselon I selama satu tahun diserahkan kepada Negara. MUI menyerahkan emas kepada Presiden RI untuk Negara, kemudian diikuti dengan

melaksanakan cinta rupiah. tetapi krisis moneter dan krisis ekonomi semakin terpuruk. Untuk mengatasi krisis tersebut pemerintah meminta bantuan IMF. IMF memberi bantuan, tetapi krisis moneter semakin terputuk.

Dalam keadaan krisis tersebut, rakyat semakin tidak percaya lagi kepada pemerintah Orde Baru dan rakyat menghendaki pemerintah RI segera mengadakan Reformasi total yang dipelopori oleh mahasiswa dengan mengadakan unjuk rasa dan mimbar bebas. Gerakan mahasiswa tersebut didukung LSM-LSM, aktivitas-aktivitas politik yang tidak setuju dengan pemerintah Orde Baru beserta kabinetnya.

Dalam menghadapi demonstrasi dan mimbar bebas yang dilakukan mahasiswa, Menhankam Pangab Jenderal TNI Wiranto memerintahkan Rektor-rektor Perguruan Tinggi, mencegah mahasiswa keluar kampus. Demonstrasi dan mimbar bebas hanya dibenarkan dilakukan didalam kampus, tidak dibenarkan dilakukan diluar kampus, takut ditunggangi pihak ketiga yang dapat melakukan tindakan anarkis. Untuk itu, aparat keamanan melakukan pengamanan diluar kampus dan mencegah mahasiswa keluar kampus. Pertama memang dipatuhi, tapi lama- kelamaan mulai adanya pelanggaran dengan adanya mimbar bebas di jalan.

Kasus –kasus kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini mencapai puncaknya dan akibatnya cukup fatal. Peristiwa-peristiwa protesnya masyarakat beserta komponen masyarakat terhadap kegagalan pemerintah dan Golkar dalam memperbaiki citra perekonomian Negara akibat keterpurukan ekonomi ditahun 1997 betul-betul menjadi wibawa pemerintah merosot pada saat itu. Tahun 1998 dicirikan dengan tahun yang penuh gejolak. Gelombang unjuk rasa para mahasiswa dan seluruh komponem masyarakat itu pada akhirnya menduduki gedung DPR/MPR dan berbuah

terjadi peristiwa “trisakti” yang mendatangkan korban mahasiswa dan buah yang paling pahit adalah suksesi pemerintahan dari Soeharto kepada BJ Habibie.

Era pemerintah BJ Habibie, dicirikan dengan sedikit pencerahan masalah demonstrasi atau penyampaian kemerdekaan pendapat, terutama dengan dicabutnya peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, yang dinilai masih mengekang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum, dan dicabutnya undang-undang No. 11/PNPS/1963 Tentang Tindak Pidana Survei dan kemudian melahirkan undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan pada akhirnya berhasil di undangkan Undang-Undang No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sebagai realisasi pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, Pemerintahan BJ Habibie, dapat mensikapi gejala demonstrasi, mimbar bebas dan sebagainya dengan menerapkan Undang-undang tersebut.¹⁰

Demonstrasi atau unjuk rasa mahasiswa dimuka umum merupakan gerakan moral tanpa adanya pemaksaan kehendak. Mahasiswa sering tidak mengetahui atau menyadari bahwa ada pihak-pihak ketiga yang menumpang kepentingan dalam gerakan moral mahasiswa. Dalam menghadapi pihak-pihak ketiga yang telah membaur dengan mahasiswa, pasukan pengendali massa sulit mengambil tindakan keras kepada mereka yang melakukan tindakan anarkis. Akibatnya sering terjadi

¹⁰ Abdussalam, *op cit.* h.2-7

dimana demonstrasi yang semula sebagai gerakan moral berubah menjadi pemaksaan kehendak, agar pemerintah melaksanakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat.

Hal itu juga, selain dengan penyusupan, juga disebabkan pejabat atau pengusaha yang menjadi sasaran unjukrasa atau demonstrasi, menolak untuk menerimanya dan tidak terjadi komunikasi serta tidak bersedia melaksanakan apa yang menjadi tuntutan aspirasi dan pendapat rakyat.¹¹

Gerakan mahasiswa sampai saat ini tetap konsisten sebagai gerakan moral. Sedangkan sikap dan tindakan pemerintah masih tetap arogan dan tidak mau mendengarkan aspirasi warga dan rakyatnya serta tidak mau memenuhi tuntutan dan harapan rakyatnya. Padahal pemerintah Indonesia berbentuk kedaulatan rakyat, yang seharusnya menerima dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dan harapan rakyatnya. Pemerintah masih tetap bersikap melaksanakan kehendaknya tanpa memperhatikan tuntutan dan harapan warga dan rakyatnya.

Secara teori dan normatif kemerdekaan menyampaikan pendapat memang benar mendapat perlindungan hukum. Tetapi realita dilapangan ternyata mereka dikekang dan dibatasi kebebasannya untuk mengeluarkan pendapat atau menyalurkan aspirasi. Begitu mereka bertentangan dengan pemerintah, mereka ditangkap, ditahan dan diproses hukum. Sedangkan bagi pejabat-pejabat atau instansi-instansi menolak dan tidak menerima massa unjuk rasa atau demonstrasi untuk menyampaikan pendapat tidak diberi sanksi apa-apa.

¹¹ Abdussalam, *Ibid* , Hal. 289

Oleh karena itu, dampak negative dari unjuk rasa atau demonstrasi mahasiswa menjadi tanggung jawab penuh pemerintah. Pemerintah semakin arogan dalam mengambil tindakan kekerasan terhadap warga yang menyampaikan aspirasi dan pendapatnya tanpa adanya kepedulian dari pemerintah. Unjuk rasa atau demonstrasi yang digelar mahasiswa bertujuan untuk menyadarkan pemerintah bahwa apa yang dilakukan pemerintah telah banyak menyimpang dari kedaulatan rakyat. Untuk itu seharusnya pemerintah menerima dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dan harapan warga dan rakyatnya. Bila pemerintah menerima dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dan harapan warga dan rakyatnya, maka dampak negative tersebut tidak akan terjadi.¹²

D. Demonstrasi Menurut Islam

Dalam istilah bahasa Arab Demonstrasi adalah, *muzhahara*, secara bahasa berasal dari kata *dhahara* yang artinya memperlihatkan, menunjukkan atau memenangkan.¹³

Di tengah dunia Islam dikenal istilah *muzhahara*, Secara sederhana *muzahhara* dapat dikatakan adalah *wasilah* (sarana) dalam penyampaian untuk mendapatkan dukungan, menarik perhatian, dan membentuk opini umum di tengah masyarakat. *Muzahhara* ditandai dengan sejumlah orang turun kejalan, lapangan atau tempat – tempat khusus yang diperuntukkan untuk hal tersebut, guna menarik perhatian dan simpati publik terhadap pendapat yang disampaikan.¹⁴

¹² Abdussalam, *Ibid*, Hal. 287

¹³ Aus Hidayat, *Fiqh Demonstrasi kajian Hukum dan Urgensi Unjuk Rasa dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Pustaka Tarbiyatuna 2002) cet I hal. 6

¹⁴ *Ibid* hal. 5

Dimasa Rasulullah SAW, maupun dalam sejarah kaum muslimin dapat kita melihat bahwa secara umum *muzhahara* ada dua jenis: pertama *muzhahara fardiyah*, sedangkan kedua *muzhahar jam`iah*. Adapun *muzhahara fardiyah* (unjuk rasa individu) adalah unjuk rasa yang dicontohkan oleh *Abu Dzar al-Ghifari*, ketika mengumandangkan kalimat tauhid ditengah orang banyak, dan *muzhahara* yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, kepada seorang laki-laki yang dizalimi tetangganya, *muzhahara* ini inisiatifnya dari individu, ketika ia merasa bahwa kebenaran itu terkungkung sedemikian rupa sehingga ia ingin menyuarakan pendapat di tengah masyarakat atau orang banyak. *Muzhahara* ini biasanya dengan cara spontanitas tanpa perencanaan sebelumnya.

Sedangkan *muzahahara jam`iyah* (unjuk rasa bersama), adalah *muzahhara* yang dilakukan dengan perencanaan oleh suatu lembaga Islam tertentu yang berkepentingan untuk menyampaikan aspirasi kelompok. Seperti *muzhahara* I yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau ketika Umar Bin Khatab dan Hamzah bin Abdul Mutholib baru masuk Islam. Rasul SAW merencanakan rumusan strateginya sedemikian rupa sehingga *muzhahara* ini mampu membangun citra Islam dan menggalang opini yang baik dihati masyarakat saat itu. *Muzhahara* bersifat kerja bersama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara organisatoris bagi kaum muslimin yang tergabung dalam lembaga yang menyelenggarakan demonstrasi (unjuk rasa) tersebut, karena merupakan hasil dari suatu musyawarah untuk melakukan aksi. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

Artinya : “dan bagi orang-orang yang menerima dan mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka”.¹⁵

Bila ada yang tidak dapat mengikuti kegiatan ini, wajib baginya berpartisipasi dalam bentuk lain, misalnya dengan memberikan dana bagi mereka yang ikut *bermuzhahara*, menyediakan kendaraan, makanan atau atribut *muzhahara*.¹⁶

Al-Qur`an dan hadist tidak secara langsung menyuruh kita untuk melakukan *muzhahara* sebagai demonstrasi, sebagaimana kita pahami sekarang ini, yang diperintahkan adalah menyampaikan kebenaran, sehingga menyampaikan atau memperjuangkan kebenaran adalah wajib .

Di dalam Al-Quran, terdapat dalam surat as-Shof ayat 9 yang berbunyi :

Artinya : “Dialah yang mengutus rasulNya dengan membawa petunjukNya dan agama yang benar agar dia memenangkan diatas segala-gala agama meskipun orang musrik benci”¹⁷

¹⁵ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahan* , (Semarang: CV Toha Putera) Cet. Hal 929

¹⁶ Aus Hidayat Nur, *op-cit* h. 60

¹⁷ Depag RI, *op-cit* h. 60

Pada ayat diatas, kalimat *liyudzirahu alad diini kullih* (agar diperlihatkan dan dimenangka atas semua agama) menunjukkan bahwa agama Allah SWT, yang mulia ini bersifat terang, terbuka, jelas dan untuk dimenangkan atau diperjuangkan oleh para penganutnya. Karena itu *Muzahhara* secara bahasa dapat dikatakan memiliki dasar al-Quran yang kuat berdasarkan ayat ini.¹⁸

Dari ayat Al-Quran dan hadist yang penulis kumpulkan, ini menunjukkan tentang memperjuangkan kebenaran yaitu kalimat *haq*. Maka dari sini penulis mengambil hukum dengan menggunakan methode Qiyas / analog yaitu, mengambil `illat yang sama dengan demonstrasi hukumannya adalah boleh, bahkan menjadi wajib, bila kondisi tidak memungkinkan lagi, seperti orang yang telah nyata bertindak maksiat.

Pada dasarnya segala macam *muzhahara* atau demonstrasi yang diniatkan karena Allah SWT, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam adalah salah satu bentuk mengingkari kemungkaran. *Muzhahara* atau demonstrasi seperti ini memiliki niat urgensi besar dalam menampakkan kekuatan kaum muslimin. *Muzhahara* untuk membela penderiatan ummat Islam itu lebih spesifik lagi, karena memperlihatkan solidaritas ukhwah kaum muslimin terhadap saudara-saudara mereka yang dizholimi.¹⁹

Dalam menunjukkan adanya kebebasan berbicara dalam ajaran Islam, sehingga seseorang mengucapkan kata-kata yang benar (*kalimat haq*) tidak boleh dilarang atau dihalang-halangi oleh siapapun. Namun dalam hadist Nabi SAW, tidak menunjukkan secara pasti bentuk mengucapkan kalimat *haq* dihadapan penguasa yang zalim,

¹⁸ *Ibid* h. 85

¹⁹ Aus Hidayat Nur, *op-cit* h. 10

apakah cukup dilakukan sendirian atau orang banyak, karena itu belaku ketentuan, apabila diungkapkan oleh banyak orang tentu akan lebih baik nilainya dibandingkan dilakukan oleh seorang individu, seperti , Nabi Musa As, ketika menyampaikan kebenaran Islam didepan Fir`aun, memohon kepada Allah SWT, agar ditemani oleh saudaranya Nabi Harun As, beliau bahwa didampingi oleh saudaranya itu perjuangannya akan lebih kokoh, Nabi Harun As, lebih paseh berbicara dihadapan umum dari padanya.

Karena bentuk-bentuk penyampaian kalimat *haq* ini semata merupakan wasilah (sarana) yang dapat ditampilkan dalam beraneka ragam cara sesuai dengan semangat zaman. Dengan demikian ber *muzhahara* atau demonstrasi untuk mengoreksi penguasa tak kala ia melakukan perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat banyak juga, yang membuat, hanya merupakan sarana saja. Sementara itu, dalam pandangan syarai`at Islam perintah kepada sesuatu yang wajib merupakan saran untuk mewujudkannya menjadi wajib pula (*al amru bisya`ien amrun bi-wasaailihi*).²⁰

Hukum asal demonstrasi *Muzharraha* atau demonstrasi adalah mubah alias boleh, muzarrahah adalah *Wasilah* (sarana), karena *muzharraha* mengambil hukum yang dimiliki oleh umumnya *wasilah*, dan hukum asal setiap *wasilah* adalah *ibahah* (boleh) dan segala hal yang mencapuri *wasilah* berupa *mukhallafah* (penyimpangan) maka, *wasilah* itu mengambil hukum yang dimiliki oleh *al-muqasshid* (tujuan). Karena *muzahhara* itu mengambil hukum *wasilah*, jika wasilah itu menyimpang,

²⁰ Abdul Mudjid , *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia), 1996 cet. 11 h. 10-11

maka hukum *muzhahhara* akan menyimpang sesuai dengan dengan tujuan yang diinginkan oleh *wasilah*.

Adapun yang dimaksud kaum muslimin dengan sasaran dari *wasilah* ini tidak lain adalah menampakkan kebenaran, menolak kezaliman, dan mengungkap kejahatan. Selain itu dengan *muzhahara* atau demonstrasi kaum muslimin dapat mengasah semangat beramar *ma`ruf dan nahi mungkar*, melalui lisan, pena dan tangan mereka sesuai dengan sarana yang mereka miliki dan mereka mampu melakukannya.²¹

Muzhahara atau demonstrasi bersama dalam menentang kebatilan adalah, sunnah syar`I dan masih berlaku sampai sekarang, yang disunnahkan Allah SWT, dalam rangka unjuk pengingkaran terhadap kerusakan.

Sedangkan menurut Abdussalam bin Barjas al Abdul Karim mengatakan bahwa *Amar ma`ruf nahi mungkar* merupakan salah satu tiang agama. Diharapkan dengan metodologi seperti itu akan tersosialisasi kebaikan dan segala bentuk kebathilan akan musnah.

Dalam undang-undang RI No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 . dalam undang-undang ini dimaksudkan dengan :

1. kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

²¹ Aus Hidayat, *op cit* h. 15

2. di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat oleh setiap orang.
3. unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum.²²

Dalam Bab IV bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat dimuka umum pasal 9 ayat 1 bentuk penyampaian pendapat dimuka umum dapat dilaksanakan dengan cara :

1. Unjuk rasa atau demonstrasi
2. Pawai
3. Rapat umum; dan atau;
4. Mimbar bebas²³

Dari dasar hukum diatas, baik yang terdapat dalam Al-Quran dan hadist maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemerintahan Indonesia, dapat dilihat bahwa hukum demonstrasi adalah boleh dibenarkan oleh Islam. Akan tetapi bagaimana pola dan bentuk yang dibenarkan oleh Islam, maka bisa dilihat pada keterangan berikut.

Demonstrasi boleh diikuti oleh seorang muslim sepanjang demonstrasi tersebut sesuai dengan tujuan Islam, yaitu bermamfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi masyarakat. Berdemonstrasi dimaksudkan untuk mencari

²² Undang-undang serikat buruh tahun 2000 dan Undang-undang tentang unjuk rasa, (Bandung : Citra Umbara) h. 136-137

²³ *Ibid* h. 140

solusi bukan untuk menimbulkan masalah baru atau memperpanjang masalah yang sudah ada.

Oleh karena itu jangan sampai seorang muslim melakukan demonstrasi dengan landasan asal beda pendapat dengan orang lain atau asal protes karena kertidak setujuannya. Demonstrasi yang sesuai dengan tuntunan Islam meliputi maksud sebagai berikut :

1. Upaya mengagungkan kebenaran dan ajaran Islam.
2. Menunjukkan kelemahan yang bathil.
3. Menunjukkan solidaritas bagi sesama yang tertindas dan menderita akibat kezaliman penguasa.
4. Berpartisipasi untuk mengurangi penderitaan masyarakat umum.
5. Menolak diberlakukannya aturan yang zalim ditengah suatu komuditas.
6. Menampakkan kejahatan dan tipu daya yahudi dan pengikutnya.

Sudah jelas, bahwa ummat ini adalah sebai-baik ummat yang senantiasa berbuat ikhsan sehingga keberadaannya sangat besar mamfaatnya bagi segenap ummat manusia. Dengan amar ma`ruf dan nahi mungkar itu mereka menyempurnakan seluruh kebaikan dan kemamfaatan bagi ummat manusia, sedangkan bagian ummat yang laintidak ada yang memerintahkan semua yang ma`ruf bagi kemaslahatan seluruh ;apisan ummat manusia, dan tidak pula melarang semua orang berbuat kemungkaran.²⁴

²⁴ Ibnu Taimiyah (Terjmahan), *Etika Beramal Ma`ruf nahi mungkar*, (Jakarta; Gema Insani Press 1995), cet IV hal. 18

Jika kemungkaran lebih dominan, perlu dicegah, meskipun akan membawa resiko hilangnya kema`rufam yang lebih kecil, maka menurut yang maruf akan mengakibatkan munculnya kemungkaran yang lebih besar. Dalam kondisi yang seimbang antara ma`ruf dan yang mungkar, dari segi kualifikasi, *amar ma`ruf nahi mungkar* secara umum harus dilaksanakan.²⁵

Kemungkaran yang diharamkan benar-benar mungkar menurut syariat, atau berdasarkan kaidah yang pasti, sedangkan kemungkaran tersebut tidak bisa di ukur hanya berdasarkan pendapat dan ijtihat, karena pendapat dan ijtihat bisa benar dan bisa salah.²⁶

Dengan demikian orang muslim bukan hanya sekedar orang shaleh untuk dirinya, berbuat baik meninggalkan keburukan, hidup pada lingkungannya sendiri, tidak mempedulikan kebaikan disingkirkan disekitarnya, tidak mempedulikan keburukan disekitarnya. Tapi orang muslim adalah orang yang shaleh terhadap dirinya dan shaleh terhadap orang lain.

Kemungkaran macam apapun yang menampakkan kehidupan harus diusir dari masyarakat muslim, orang muslim dituntut senantiasa menghadapi kemungkaran dan mengusirnya, sehingga tidak ada yang menyisa kecuali kebenaran di bumi Allah SWT.²⁷

²⁵ *Ibid* h. 28

²⁶ Yusuf Qardawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Quran dan Sunnah*, (Jakarta; Pustaka Al Kuasar) 1997 Cet. 1 h. 169-170

²⁷ *Ibid* h. 168

Permasalahan yang beraneka ragam bentuk dan jenisnya, yaitu menyeru kepada setiap individu, keharusan untuk melaksanakan Undang-undang, bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukan, menyeru untuk berbuat baik, melarang melakukan hal-hal yang cenderung tidak mendangkan keuntungan bagi orang banyak, kewajiban itu dalam bahasa sekarang dinamakan kebebasan menyampaikan pendapat, tidak cukup itu saja, kewajiban tersebut menjadi kewajiban individu dan kelompok untuk melakukan perbuatan didalam masyarakat.²⁸

Apapun bentuk-bentuk demonstrasi yang diperbolehkan dalam Islam menurut Shek al Munajjid adalah sebagai berikut:

- a. Tidak boleh bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan disaat berlangsungnya aksi demonstrasi.
- b. Tidak bolehnya berdiri orang demonstran dihadapan kuburan orang kafir atau meletakkan karangan bunga diatas kuburannya.
- c. Tidak boleh menghinakan diri dengan ungkapan-ungkapan yang merendahkan kaum muslimin.
- d. Tidak boleh menzalimi orang lain, seperti menutup jalan dan mematikan lampu lalu lintas.
- e. Tidak boleh mempergunakan pola caci maki, dan celaan-celaan yang tidak diperbolehkan syari`at.²⁹

²⁸ Diaduddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta; Gema Insani Press) 2001 cet. I hal. 259

²⁹ Abdussalam bin Barjas, *op cit* h. 71-72

Oleh karena itu, kebebasan berbicara dalam Islam sangat dijaga dan dihormati, asalkan dalam berbicara atau menyampaikan pendapat tersebut sesuai dengan tuntunan Islam, yaitu mengeluarkan pendapat atau berdemonstrasi dengan kata-kata yang benar serta bertujuan untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

BAB IV

PERSEPSI AKTIVIS MAHASISWA UIN SUSKA RIAU TERHADAP DEMONSTRASI

A. Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN Suska Riau

Demonstrasi merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan demokrasi, karena demonstrasi merupakan salah satu hak kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum baik pendapat tersebut berupa tanggapan, saran kritikan dan lain sebagainya untuk disampaikan kepada pemerintah yang berkuasa.

Dengan diberikannya kebebasan berpendapat yang diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 yang berbunyi “ kemerdekaan menyampaikan pendapat dan pikiran dengan lisan dan tulisan diatur sepenuhnya dalam undang-undang”. Kemudian didalam Peraturan Perundang-Undangan No. 2 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat dimuka umum juga mendapat pengaturan sehingga hak seseorang dijamin dihadapan hukum.

Adanya undang-undang tersebut membuktikan bahwa demonstrasi di Negara demokrasi merupakan suatu hak yang sangat dijaga dan dihormati sehingga siapa saja yang menyampaikan pendapat, saran, ataupun kritikan maka akan mendapat perlindungan dari hukum atau undang-undang.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, demonstrasi merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui seberapa pemahaman ungkapan demonstrasi dengan responden yang terdiri dari mahasiswa/I UIN Suska Riau.

TABEL I
PEMAHAMAN RESPONDEN TERHADAP DEMONSTRASI

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Hak untuk Menyampaikan Pendapat (Kritik, Saran. Dll)	88	74 %
2	Hak Kebebasan Mengkritik	30	25 %
3	Hak untuk Berbuat Anarkis	0	0 %
4	Tidak Tahu	2	1 %
	Jumlah	120	100%

Dari tabel I di atas dapat dilihat bahwa persepsi responden yang memahami bahwa demonstrasi adalah untuk menyampaikan pendapat adalah sebanyak 88 orang atau 74 %, sementara yang memandang bahwa demonstrasi sebagai hak kebebasan adalah sebanyak 30 orang atau 25 % , kemudian 2 orang atau sekitar 1 % yang memilih tidak tahu, dan yang memilih untuk berbuat anarkisme adalah sebanyak 0 orang atau 0 %.

Tabel di atas merupakan hasil dari persepsi responden menganggap bahwa demonstrasi merupakan hak yang dimiliki seseorang atau kelompok guna untuk menyampaikan pendapat berupa kritikan, saran, kecaman, dukungan dll. Kepada pemerintah atau kepada siapa saja yang melanggar hak-hak orang lain.

Jika diperhatikan persentase tertinggi adalah (74 %), maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa UIN Suska Riau mengenai demonstrasi adalah untuk menyampaikan pendapat baik berupa tanggapan, kritikan, saran dll.

Demonstrasi bisa dilakukan siapa saja yang merasa hak mereka terganggu oleh orang lain atau pihak lain, dari sekian banyak demonstrasi yang ada, kebanyakan pelaku atau yang memelopori demonstrasi tersebut adalah dari kalangan mahasiswa. Hal ini bisa dilihat terhadap persepsi responden pada tabel berikut :

TABEL II
PERSEPSI RESPONDEN TENTANG PELAKU DEMONSTRASI

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Masyarakat Umum	35	29 %
2	Mahasiswa / Pelajar	57	49 %
3	Lembaga- lembaga politik / non politik	19	15 %
4	Tidak tahu	9	7 %
	Jumlah	120	100%

Dari tabel II di atas dapat diketahui bahwa persepsi responden yang memilih pelaku demonstrasi adalah kebanyakan berasal dari kalangan mahasiswa atau pelajar yaitu sebanyak 57 orang atau 49 % responden, sedangkan responden yang memilih masyarakat umum yang terdiri dari buruh, pedagang pasar, karyawan dll sebagai pelaku demonstrasi adalah sebanyak 35 Responden atau 29 %, kemudian 19 orang yang memilih bahwa demonstrasi dilakukan oleh lembaga-lembaga non partai politik

atau lembaga politik dan yang memilih tidak tahu adalah sebanyak 9 orang atau sekitar 7 %.

Jika dilihat dari persentase pada tabel II di atas tertinggi adalah (49%), maka dapat Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN Suska Riau dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan demonstrasi mahasiswa adalah yang sering melakukannya.

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk tindakan yang diperlihatkan oleh rakyat terhadap pemerintah dalam menghadapi satu bentuk perubahan menuju *amar ma'ruf nahi mungkar*. Serta untuk mengangkat masalah baru agar diketahui oleh public atau khalayak ramai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini;

TABEL III
PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP TUJUAN DEMONSTRASI

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Untuk amar ma'ruf nahi mungkar	45	37%
2.	Untuk Mengangkat masalah baru	41	35 %
3.	Untuk Pamer	29	25 %
4.	Tidak tahu	5	3 %
	Jumlah	120	100%

Dari tanggapan responden pada table III di atas dapat kita lihat bahwa kebanyakan responden memilih jawaban untuk menegakkan *amar ma'ruf dan Nahi mungkar* yaitu sebanyak 45 orang atau sekitar 37 %, kemudian untuk mengangkat masalah baru

dengan jumlah 41 orang atau 35%, sementara yang berpersepsi untuk pamer 29 orang atau 25%. dan yang memilih tidak tahu adalah sebanyak 5 orang atau 3 %.

Jika dilihat dari persentase pada tabel III di atas persentase tertinggi adalah (37%), maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa UIN Suska Riau berpersepsi demonstrasi bertujuan untuk menegakkan *amar ma'ruf wa nahi mungkar*.

Menurut Two Bagus PP, Demonstrasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh mahasiswa atau masyarakat dalam mengungkap masalah-masalah yang belum diketahui oleh masyarakat umum, sehingga dengan di lakukan demonstrasi tersebut yang mengangkat sebuah isu baik yang berhubungan dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab maupun mengenai hal-hal yang bersifat positif yang biasanya diikuti dengan aksi demonstrasi berupa dukungan.¹

Dalam menyampaikan pendapat terhadap pemerintah bisa dilakukan dengan banyak cara, diantaranya adalah melalui media massa, ormas LSM, partai politik, berdialog langsung dengan wakil rakyat, demonstrasi dan lainnya. Dari banyak cara yang bisa dilakukan oleh responden dalam menyampaikan pendapat terhadap pemerintah maka bisa dilihat pada tabel dibawah ini manakah jalan yang lebih disukai responden dalam menyampaikan hak kritik terhadap pemerintah:

¹ Two Bagus PP, aktivis UIN Suska (Ketua Umum BM1R). *wawancara*, Pekanbaru, 15 April

TABEL IV
PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP MEKANISME PENYAMPAIAN
PENDAPAT

No	Jawaban Responden	Fekuensi	Persentase
1.	Melalui Berdemonstrasi	40	34 %
2.	Berdialog dengan wakil rakyat	41	34 %
3.	Melalui Media Massa	33	28 %
4.	Tidak Tahu	6	4 %
	Jumlah	120	100%

Dari tabel IV di atas dapat dilihat bahwa kebanyakan responden memilih melalui memilih berdialog dengan wakil rakyat/ pemerintah yaitu 41 orang atau 34%, melalui berdemonstrasi dalam menyampaikan pendapat yaitu sebanyak 40 orang atau 34%, kemudian melalui media massa adalah sebanyak 33 orang atau 28 %, sementara yang memilih tidak tahu adalah sebanyak 6 orang responden atau 4%.

Jika dilihat dari persentase pada tabel IV di atas tertinggi adalah (34%), maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa UIN Suska Riau memiliki persepsi bahwa cara yang akan ditempuh oleh mahasiswa dalam menyampaikan pendapat adalah melalui demonstrasi dan berdialog dengan wakil rakyat.

Kemudian jika dilihat dari pendapat responden tentang efektifitas demonstrasi sebagai salah satu cara menyampaikan hak kebebasan berpendapat atau hak kritik terhadap pemerintah, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL V

PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP EFEKTIFITAS DEMONSTRASI

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Efektif	41	35 %
2.	Kurang efektif	34	29 %
3.	Tidak efektif	38	31 %
4.	Tidak tahu	7	5 %
	Jumlah	120	100%

Dari tabel V di atas dapat diketahui bahwa Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN mengenai efektifitas demonstrasi kebanyakan berpendapat efektif adalah 41 orang atau 35%, kemudian 38 orang atau 31 %, yang berpendapat bahwa demonstrasi tidak efektif dalam menyampaikan pendapat, sementara 34 orang atau 29% yang memiliki persepsi bahwa demonstrasi kurang efektif dalam menyampaikan pendapat, sedangkan 7 orang atau 5% yang memilih tidak tahu.

Jika dilihat dari tabel V di atas persentase tertinggi adalah (35%), maka dapat disimpulkan bahwa sebahagian besar mahasiwa UIN Suska Riau bernggapan demonstrasi efektif dilakukan dalam menyampaikan pendapat.

Mahasiswa merupakan intelektual muda yang siap memberikan perubahan kearah yang lebih baik dalam segala bidang, perubahan-perubahan itu akan muncul jika seandainya setiap tindakan yang dilakukan mahasiswa dibarengi rasa idealisme yang

tinggi, sehingga sewajarnya mahasiswa menjadi *The agent of chence* orang yang bisa merubah paradigma kearah lebih baik.²

Kemudian jika dilihat dari tingkat partisipasi mereka untuk tergabung dalam demonstrasi dapat diketahui pada tabel berikut ini :

TABEL VI
PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP PARTISIPASI MEREKA DALAM
DEMONSTRASI

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	5	4 %
2.	Sering	31	26 %
3.	Jarang	26	21 %
4.	Tidak Pernah	58	49 %
5.	Tidak tahu	0	0 %
	Jumlah	120	100%

Dari tabel VI di atas, bisa kita lihat bahwa responden yang tidak pernah ikut adalah sebanyak 58 orang 49%, kemudian yang sering ikut dalam demonstrasi adalah 31 orang atau 26%, serta 26 orang atau 21 % yang jarang ikut demonstrasi dan 5 orang atau 4 % yang selalu.

² Mantara Rusli, mahasiswa UIN Suska Riau (aktivis HMI), *Wawancara* Pekanbaru, 25 april

Jika dilihat pada tabel di atas persentase tertinggi adalah (49%), maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa UIN Suska Riau dalam melakukan demonstrasi banyak yang tidak pernah ikut.

Ada hal yang menarik mengenai fenomena demonstrasi, sekarang ini demonstrasi tidak begitu diminati oleh banyak kalangan terutama mahasiswa, hal ini disebabkan karena mahasiswa memiliki banyak persepsi mengenai hal ini, ada yang beranggapan bahwa demonstrasi hanyalah menguntungkan para Koordinator Lapangan (Ketua Pelaksana Demonstrasi) dengan mendapat bayaran dari pihak lain sehingga mahasiswa yang tergabung hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini terlihat sangat berbeda dengan mahasiswa pada masa Orde Baru dengan rasa idealisme yang tinggi mahasiswa merupakan pelopor dari demonstrasi yaitu ketika jatuhnya rezim Orde Baru dengan kediktatoran penguasa pada masa itu.³

Kemudian jika dilihat dari persepsi responden terhadap demonstrasi sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemerintah berkuasa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

³ Usman, Mahasiswa UIN (aktivis IPNU) , *Wawancara*, Pekanbaru, 23 April 2009

TABEL VII
PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP DEMONSTRASI DALAM
MENYELESAIKAN MASALAH

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Bisa menyelesaikan masalah	61	50 %
2.	Tidak bisa menyelesaikan masalah	42	36 %
3.	Hanya menambah masalah baru	12	10 %
4	Tidak tahu	5	4 %
	Jumlah	120	100%

Dari tabel VII di atas pendapat responden dapat diketahui bahwa demonstrasi yang dilakukan bisa menyelesaikan masalah adalah 61 orang atau 50%, kemudian yang menjawab bahwa tidak bisa menyelesaikan masalah adalah 42 orang 36%, sementara sebanyak 12 orang atau 10% yang menjawab bisa menyelesaikan masalah dan yang memilih jawaban tidak tahu adalah sebanyak 5 orang atau 4%.

Jika dilihat pada tabel di atas persentase tertinggi adalah (50%), maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa UIN Suska Riau memiliki persepsi demonstrasi bisa menyelesaikan masalah.

Demokrasi pancasila yang di anut oleh Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, keberagaman merupakan salah satu pemicu terhadap penghormatan hak kebebasan yang dimiliki seseorang, termasuk berdemonstrasi merupakan hak kebebasan berpendapat seseorang. disamping demonstrasi merupakan hak yang dimiliki setiap individu dan memperjuangkannya agar hak itu kembali,

tetapi terkadang dampak dari demonstrasi juga bisa mengganggu hak orang lain.

Untuk lebih jelasnya, kita lihat tabel yang dibawah ini:

TABEL VIII
PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP DAMPAK DEMONSTRASI

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Baik	49	39 %
2	Kurang Baik	42	36 %
3	Tidak Baik	25	22 %
4	Tidak Tahu	4	3 %
	Jumlah	120	100%

Dari tabel VIII di atas kita bisa melihat Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN Suska Riau berpersepsi bahwa demonstrasi itu adalah baik dengan persentase 39 % atau yaitu dengan jumlah persepsi 49 orang, sedangkan yang mengatakan kurang baik adalah 42 orang atau 36 % kemudian yang tidak baik adalah sebanyak 25 orang 22 % sedangkan yang memilih tidak tahu adalah 4 orang atau 3 %.

Jika dilihat pada tabel di atas persentase tertinggi adalah (39%), maka bisa disimpulkan bahwa mahasiswa UIN Suska Riau memiliki persepsi bahwa dampak yang ditimbulkan demonstrasi adalah baik.

Ditinjau dari segi dampak demonstrasi, hal yang paling sering dirasakan masyarakat adalah seringnya terjadi kemacetan di jalan dikarenakan para demonstrasi mengambil sebahagian badan jalan, namun demikian masyarakat kita umumnya memahami dengan hal tersebut, dengan demikian mereka juga mendapatkan informasi mengenai permasalahan aktual yang terjadi ditengah-tengah mereka dan itu merupakan salah satu dampak positif yang dirasakan masyarakat disamping itu mahasiswa juga dilatih untuk bisa berbicara dan mengeluarkan pendapat dimuka umum. Disamping itu juga kami berusaha menghindari demonstrasi yang anarkis sehingga berdampak kepada pengrusakan pasilitas sosial.⁴

B. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Dari persepsi di atas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mereka dalam menjadikan demonstrasi sebagai salah satu cara mengkritisi pemerintah. Untuk mengukur sejauhmana pandangan mahasiswa UIN terhadap demonstrasi, dapat kita lihat dari jawaban yang dikemukakan oleh responden baik melalui angket ataupun melalui wawancara untuk lebih jelasnya pengaruh tersebut dapat kita lihat table dibawah ini;

⁴ Usman, *ibid*

TABEL IX
LATAR BELAKANG DILAKUKAN DEMONSTRASI

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Karena Protes Terhadap Kebijakan Pemerintah	68	57%
2	Karena Mendukung Kebijakan Pemerintah	29	25%
3	Karena Menunjukkan eksistensi Mahasiswa	15	12%
4	Tidak Tahu	8	6%
	Jumlah	120	100%

Dari tabel IX di atas dapat diuraikan bahwa sebagian besar responden berpersepsi bahwa latar belakang dilakukan demonstrasi adalah karena untuk melakukan protes atau kritik terhadap pemerintah yaitu berjumlah 68 orang atau 57%, karena mendukung kebijakan pemerintah sebanyak 29 orang atau 25%, kemudian 15 orang responden atau 12% berpersepsi bahwa latar belakang demonstrasi dilakukan karena untuk menunjukkan eksistensi mahasiswa, dan terakhir 8 orang responden atau 6% yang memilih tidak tahu mengenai latar belakang dilakukannya demonstrasi tersebut.

Jika dilihat pada tabel di atas persentase tertinggi adalah (57%), maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa UIN Suska Riau memiliki persepsi terhadap latar belakang dilakukan demonstrasi adalah untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.

Demonstrasi merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dimiliki semenjak lahir, yaitu berupa hak kebebasan berpendapat, mengeluarkan pikiran, lisan dan tulisan dan lain sebagainya diatur oleh Negara, didalam hak kebebasan berpendapat tersebut juga terdapat berbagai hak-hak yang dimiliki manusia yaitu berupa hak berbicara didepan umum, hak berpendapat, dan termasuk hak mengeluarkan kritik, semua hak tersebut di atas dimiliki oleh setiap dan dalam pelaksanaannya diatur sepenuhnya dalam Undang-undang.⁵

Keengganan mahasiswa untuk tergabung dalam demonstrasi disebabkan beberapa faktor, namun yang terbanyak adalah bahwa mereka pada dasarnya tidak mengetahui apa permasalahan yang diangkat dari demonstrasi yang dilakukan, disamping alasan-alasan lain. Hal ini dapat diketahui alasan responden untuk tidak tergabung dalam aksi demonstrasi.

⁵ Ilham Khuldi, Mahasiswa UIN Suska Riau (Aktifis HMI) *Wawancara* ,Pekanbaru, tgl 9 Mei

TABEL X
FAKTOR TIDAK IKUT MAHASISWA DALAM DEMONSTRASI

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Karena tidak percaya kepada aktivis demo	31	26%
2.	Karena tidak paham masalahnya	65	54 %
3.	Karena malas	23	19 %
4.	Tidak tahu	1	1 %
	Jumlah	120	100%

Dari tabel X di atas dapat diketahui bahwa persepsi responden yang terbanyak memiliki persepsi tidak ikut berdemonstrasi karena tidak paham masalah dan tujuan masalahnya yaitu sebanyak 65 orang atau 54%, sementara yang memiliki persepsi tidak percaya kepada aktivis demo adalah sebanyak 31 orang atau 26% ,, kemudian yang tidak ikut karena malas adalah sebanyak 23 orang atau 19% dan 1 orang memilih tidak tahu.

Jika dilihat pada tabel di atas persentase tertinggi adalah (54%), maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN Suska Riau terhadap penyebab mereka tidak ikut demonstrasi adalah karena mereka tidak mengetahui masalah dan tujuan masalah yang diangkat para demonstiran.

Sedangkan jika dilihat dari persepsi mereka tentang keikutsertaan mahasiswa dalam berdemonstrasi, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

TABEL XI

FAKTOR KEIKUT SERTAAN MEREKA DALAM DEMONSTRASI

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Karena dukungan solidaritas	54	44 %
2.	Karena ikut-ikutan	27	24 %
3.	Karena diajak senior/kawan	23	19 %
4.	Tidak tahu	16	13 %
	Jumlah	120	100%

Dari jawaban tabel XI di atas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden memilih jawaban karena untuk dukungan solidaritas yaitu sebanyak 54 orang atau 44%, kemudian jawaban hanya ikut-ikutan berdemonstrasi adalah 24 orang atau 24%, sementara yang diajak kawan atau seniornya adalah sebanyak 23 orang atau 19% dan yang memilih jawaban tidak tahu adalah sebanyak 16 orang atau 13%.

Jika dilihat pada tabel di atas persentase tertinggi adalah 44%, maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN Suska Riau terhadap penyebab keikut-sertaan mereka dalam demonstrasi adalah untuk bersama-sama berjuang demi kepentingan rakyat atau dalam bentuk solidaritas.

Memang banyak diantara mahasiswa yang ikut dan bergabung dalam demonstrasi merupakan bentuk solidaritas yaitu dengan kesadaran yang tinggi dari masing mahasiswa tersebut, namun juga banyak diantara mahasiswa yang diperintah seniornya atau diajak kawannya sehingga mereka terkesan ikut-ikutan.⁶

⁶ Ilham Khuldi, *Ibid*

C. Perspektif Fiqh Siyasah

Persepsi Aktivis Mahasiswa UIN Suska Riau terhadap demonstrasi di atas merupakan cerminan pendapat mereka terhadap perkembangan demonstrasi belakangan ini, persepsi demonstrasi tersebut sesuai dengan tuntunan syari`at, karena dalam melakukan demonstrasi memiliki tujuan berdasarkan kepada *amar ma`ruf nahi mungkar* dan dilakukan atas dasar perjuangan kepada kepentingan rakyat.

Dalam Islam memberikan hak kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat kepada seluruh warga negara Islam dengan syarat bahwa hak itu digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan untuk membuat kerusakan dimuka bumi. Konsep Islam tentang kebebasan mengeluarkan pendapat jauh lebih tinggi dari pada hak yang diakui oleh dunia Barat dengan konsep demokrasi mereka (begitu juga di Indonesia).

Memang hak untuk kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum guna menyebarkan kebaikan dan kebajikan bukan hanya semata-mata sebagai hak, tetapi juga sebagai suatu kewajiban. Siapapun yang berusaha menyangkal hak ini terhadap rakyatnya secara terang-terangan berarti menentang Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak itu sama dengan hak dan kewajiban individu untuk berusaha menghentikan kejahatan, baik kejahatan yang dilakukan individu ataupun kelompok orang, pemerintah, negara atau pemerintah negara lain. Terhadap hal itu ia harus mengutuk kejahatan secara terbuka dan menunjukan kepada moral yang benar dan harus dilakukan.

Dapat pula dikatakan bahwa dari hak mengeluarkan pendapat ini, yang diberikan oleh Islam hak untuk menentang pemerintahan yang *tirani*, dengan menyampaikan pendapat kita yang benar, sebagaimana firman Allah SWT :

Artinya : *“Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terang-terangan kecuali dilakukan oleh orang yang teraniaya”*⁷

Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum.⁸

.Daripada definisi itu sendiri, kita dapat fahami bahawa demonstrasi tidak membawa apa-apa konotasi yang negatif, apalagi yang menjurus kepada kesalahan. Demonstrasi pada hakikatnya merupakan salah satu cara untuk menampakkan aspirasi ataupun pendapat (*ta'bir ar-ra'yi*) masyarakat secara berkumpul.

Namun demikian, apa yang lebih penting bagi kita sebagai umat Islam adalah untuk memandang pengertian demonstrasi dari perspektif Islam. Secara umum, aktivitas menampakkan aspirasi atau pendapat di dalam Islam adalah perkara yang

⁷ Depag RI, Alquran dan Terjemahan (Semarang : Toha Putera 1989),, h. 174

⁸ Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka umum, Pasal 1, Butir 1. dalam hal ini penulis mengutip dalam buku Abdussalam Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Hal. 25

dibolehkan (mubah). Hukumnya sama seperti kita mengungkapkan pandangan atau pendapat tentang suatu perkara, cuma dalam hal ini ia dilakukan oleh sekumpulan orang.

Dalam pandangan atau persepsi responden di atas, bahwa demonstrasi yang dilakukan adalah kebanyakan bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan menegakkan kebaikan *amar ma`ruf dan nahi mungkar*, disamping untuk menjaga hak seseorang untuk tidak diganggu oleh orang lain. Hal tersebut bisa dijadikan alasan bahwa demonstrasi yang bersifat *amar ma`ruf dan nahi mungkar* merupakan termasuk dalam demonstrasi aman (*masiirah*) dan hal tersebut dianjurkan didalam Islam.

Allah mewajibkan umat Muhammad Saw, untuk melaksanakan *amar ma`ruf nahi mungkar* sebagaimana Firman-Nya :

Artinya “ *hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, dan menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang mungkar, merkalah orang-orang yang beruntung. (Q.S Ali Imran : 104)* ⁹

⁹ Abdussalam Bin Barjas, *Etika mengkritik Penguasa* (Pustaka Assunnah, Surabaya 2002) Cet.I hal. 27

Tata cara penyampaian pendapat menurut siyasah Islam *amar bi ma'ruf nahi anil mungkar*, dapat dilakukan dalam tiga tahap :

1. Dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik (tangan/ kekuasaan) dalam pengertian kekuasaan untuk merubah keadaan tersebut, sehingga masyarakat menjadi baik dan tentram kembali.

2. Apabila ia tidak memiliki kekuasaan tersebut, dilakukan dengan menggunakan ucapan lisan atau tulisan.

3. Apabila juga tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk melakukan secara lisan atau tulisan, ia harus menyatakan kebencian didalam hatinya dengan jalan mengisolasi diri dan tidak ikut serta terhadap keadaan yang mungkar tersebut.¹⁰

Hal ini terdapat dalam hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Muslim :

Artinya “ *barang siapa diantara kalian menyaksikan perbuatan yang mungkar, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya, abila tidak mampu, maka dengan lisannya apabila tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah gambaran paling rendahnya keimanan. (H.R Muslim).*¹¹

¹⁰ Abdul Qadir al Jailani, *Negara ideal menurut Konsep Islam* (Surabaya : Bina Ilmu 1995)h. 153-156

¹¹ Abdussalam *Op-Cit.* Hal, 29

Dalam menyampaikan pendapat dan pandangan Siyasah Islam harus dengan sopan, tidak dengan kata-kata yang keji. Sebab Allah tidak menyukai ucapan yang buruk (mencaci maki orang, menerangkan keburukan orang lain, menyinggung perasaan orang lain, dan sebagainya) dengan terus terang kecuali terhadap orang yang dianiaya.

Allah Swt memberikan petunjuk dalam Surat An Nahl :

Karenanya, seseorang yang menggunakan hak kebebasan berpendapat untuk membimbing dan mengajak ummat kejalan yang benar, harus dengan jalan yang bijaksana. Artinya untuk menyerukan pendapat yang benar haruslah pula diiringi dengan cara yang baik dan benar pula, sehingga yang mendengar pendapat kita mau mengikuti apa yang kita kemukakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan persepsi mahasiswa UIN Suska Riau terhadap pelaksanaan demonstrasi sebagai mekanisme menyampaikan pendapat (kritikan, saran, dukungan dll) adalah sebagai berikut :

1. Persepsi mahasiswa UIN Suska Riau terhadap demonstrasi adalah bahwa demonstrasi merupakan salah satu cara yang efektif ditempuh rakyat untuk menyampaikan pendapat berupa kritikan, saran dll. Terhadap pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang bertujuan untuk menegakkan *amar ma'ruf wa nahi mungkar*.
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi mahasiswa UIN Suska Riau terhadap demonstrasi adalah:
 - a. Bahwa demonstrasi dilatarbelakangi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.
 - b. Bahwa kurangnya peminat mahasiswa UIN Suska Riau disebabkan karena mereka tidak mengetahui secara pasti permasalahan yang diangkat para demonstran serta tujuan dari penyelesaian masalah tersebut.
 - c. Bahwa keikutsertaan mereka lebih didasari oleh sifat memberikan dukungan solidaritas untuk rakyat.

3. Demonstrasi dasar hukumnya adalah *mubah* (boleh), dan hukum demonstrasi tersebut bisa berubah dengan melihat kondisi yang terjadi. Jika demonstrasi untuk memperjuangkan hak yang dirampas sekaligus menegakkan *amar ma`ruf nahi mungkar* dan tergolong Demonstrasi Aman, maka hukumnya boleh dan bahkan wajib. Tetapi jika demonstrasi bertujuan untuk anarkisme merusak fasilitas sosial dan tergolong kepada demonstrasi anarkis, maka hukumnya adalah haram.

B. Saran-saran

Dari analisa dan kesimpulan diatas, maka dapatlah penulis berikan beberapa saran kepada para demonstran yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi dalam menggunakan hak kritik terhadap pemerintah, antara lain:

1. Agar demonstrasi yang dilakukan dan menjadi ciri dari perjuangan mahasiswa bisa dipertahankan, maka hendaknya para aktivis perjuangan reformasi yang menyuarakan aspirasi hendaknya mempertahankan idealisme mahasiswa yang dimiliki, karena idealisme tersebut merupakan martabat mahasiswa yang mesti dijaga, ketika idealisme bisa diganti dengan rupiah atau harta benda, maka *legitimasi* seorang mahasiswa akan hilang, yang muncul adalah *ilegitimasi* atau saling tidak percaya, mahasiswa sudah tidak percaya kepada mahasiswa, rakyat sudah tidak percaya kepada mahasiswa, pemerintah juga sudah tidak percaya kepada mahasiswa dan sebaliknya. Yang justru terjadi adalah krisis kepercayaan satu sama lain yang mengakibatkan timbulnya akar permasalahan yang ada.

2. Aktivis adalah orang yang siap berjuang ketika hak orang lain dirampas, dan aktivis merupakan lokomotif pergerakan dari perjuangan tersebut, oleh karena itu, konsisten didalam berjuang tanpa mengharapkan imbalan dan pasilitas merupakan keniscayaan, dan hendaknya semua perjuangan-perjuangan tersebut agar dilakukan dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan ridho dari Allah SWT, agar bermamfaat untuk didunia dan akhirat.
3. Para mahasiwa yang memiliki persepsi, bahwa demonstrasi hanya untuk untuk pamer para kativis, demonstrasi telah ditunggangi pihak ketiga dan yang menikmati hasil adalah para senior atau yang Korlap (koordinator lapangan) saja, dan sebagainya, hedaklah dibuang jauh-jauh persepsi tersebut, karena akibat yang ditimbulkan adalah timbulnya *apatisme* (keengganan mahasiswa untuk tidak berbicara dan menuruti kebijakan-kebijakan yang ada walaupun itu mengekang mahasiswa atau rakyat sendiri).
4. Perjuangan menuju perubahan belum selesai, ada banyak hal yang mesti dirubah dengan tangan pemuda/ mahasiswa. Ingatlah perubahan itu berawal dari aktivis – aktivis pemuda, tidak ada dalam sejarah yang tua bisa merubah sesuatu secara radikal. Pemudalah yang siap untuk itu dan mengibarkan bendera merah putih di negara lain. Ketika tidak adalagi perubahan dan terobosan baru dari pemuda berupa inovasi pemikiran dan berbagai karya, maka besar kemungkinan tidak ada kemakmuran yang akan dicapai sebagaimana yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang –Undang Dasar 1945 yang menjadi tujuan kita bernegara.

Demikianlah penelitian ini penulis buat, semoga menjadi informasi dan karangan yang bermamfaat terhadap aktivis-aktivis mahasiswa sebagai landasan bergerak dan berjuang kerarah yang lebih baik. Semoga karangan ini berguna bagi para pembaca keseluruhan, dan didalam penelitian ini banyak terdapat kekurangan, kritikan dan saran berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penelitian –penelitian dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT tetap meridhoi dan menjadi amal ibadah apa yang dikerjakan hamba-hambanya.

Amin yarabbal`alamin.

Wallauhuwafiq ila aqwamitthariq.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, *kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum* (Jakarta ; Restu Agung, 2006) cet. 1
- Abdussalam bin Barjas al Abdul Karim, *Etika Mengkritik Penguasa*, (Surabaya; Pustaka Assunnah, 2002) cet.1
- Al Jailani, Abdul Kadir, *Negara Ideal Menurut Konsep Islam* (Suarabaya; Bina Ilmu 1995) Cet. I
- Nur, Aus Hidayat, *Fiqh Demonstrasi Kajian Hukum dan Urgensi Unjuk Rasa dalam Pandangan Islam*, (Jakarta; Pustaka Tarbiyatuna 2002) cet. 1
- Madjid, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta; Kalam Mulia, 1996) cet. 11
- Rais, Diaduddin, *Teori Politik Islam*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2001) cet. 1
- RI, DEPAG, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Semarang; CV Toha Putera) Cet. 4
- Nasution, Harun, *Islam ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta; UI Press, 1978) Cet. 1
- Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi* (Sinar Baru Algensindo; Bandung 2008) cet. 11
- Syafi'I, Inu Kencana, *Alquran dan Ilmu Politik*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2000) cet. 2
- Gunawan, Ilham, *Kamus Politik Internasional*, (Jakarta; PT Restu Agung, 1999) cet. 1
- Yusanto, Ismail, *Islam Idiologi*, (Jawa Timur, Al- Izzah, 2004) cet.1
- Taimiyah, Ibnu, *Etika Beramal Ma'ruf nahi mungkar*, (Jakarta; Gema Insani Press, 1995) cet. 4
- Rum, Muhammad, *Strategi Perang Salib, Majalah Sabili* (Jakarta; edisi No. 14. Th. X130 Januari 2004) cet. 14

Munandar, Suleman, *Ilmu Sosial Dasar; Teori dan Konsep Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung; PT Eresco, 1990) cet. 4

Purwadaminta, WJS, *Kamus Latin Indonesia*, (Jakarta:TT) cet. 4

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum*, Pasal 1, Butir 1. Cet. I

Sri Sumantri Marto Suwiknjo, *Pengantar Perbandingan antar Hukum Tata Negara*, (Jakarta : CV. Raja Wali 2001) cet. 2

Poerwadaminta, WJS, Wasito Wojo S, , *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris*, (Jakarta; Hasta) cet. 4

Wasito, W Tito, Wasito Wojo , *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, (Bandung: Penerbit HASTA, 1980), Cet. 10.

Salim Yenny, Salim Peter, *kamus bahasa Indonesia kontemporer*, (Jakarta : modern English press, 1991), cet.I.

Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Negara*, terj. Syafril Halim (Jakarta ; Rabbani Press. 1997) cet. 3

Internet:

Http: *Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMFA)*@ Geoggle.com

Wawancara:

Khuldi, Ilham, *Mahasiswa Fak. Psikologi UIN Suska Riau (Aktifis HMI Komisariat UIN Suska Riau)* Pekanbaru, 9 Mei 2009

Rusli, Mantara, *Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau (Aktivis HMI)* Pekanbaru, 4 September 2008

Bagus pp, Two, *Mahasiswa Fak. Ekonomi UIN Suska Riau (Aktivis/ Ketua Umum BM IR)* Pekanbaru, 15 April 2009

Usman, *Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau (Aktivis IPNU)* Pekanbaru, 23 April 2009

DAFTAR TABEL

Tabel I Pemahaman Responden Terhadap Demonstrasi.....	43
Tabel II Persepsi Responden Tentang Pelaku Demosntrasi.....	44
Tabel III Persepsi Responden Terhadap Tujuan Demonstrasi.....	45
Tabel IV Persepsi Responden Terhadap Mekanisme Menyampaikan Pendapat.....	47
Tabel V Persepsi Responden Terhadap Efektifitas Demosntrasi.....	48
Tabel VI Persepsi Responden Terhadap Partisipasi Dalam Demonstrasi.....	49
Tabel VII Persepsi Responden Demonstrasi Dalam Menyelesaikan Masalah.....	51
Tabel VIII Persepsi Responden Terhadap Dampak Demonstrasi.....	52
Tabel IX Latar Belakang Dilakukan Demonstrasi.....	54
Tabel X Faktor Tidak Ikut Mahasiswa dalam Demonstrasi.....	56
Tabel XI Faktor Keikut Sertaan dalam Demonstrasi.....	57



MAHA KARP
UNTUK ORANG TUA

*Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 125 LT. II Tangkerang Pekanbaru.
Pulau Sipan Inuman, Rw. II. RT I Jl. Dewa Ruci Kuansing.
e-mail : Edwin_boboy@yahoo.com
Facebook : Abdussalam Pekanbaru
Handpone : 0852 6589 2969*



Abdussalam, S.Hi., dilahirkan pada tanggal, 12 Juni 1984 di Desa Pulau Sipan Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak **H. Muslim bin H. Jusuf** dan Ibu **Fitri Yanis**. Pertama kali mengenyam pendidikan formal di SD 016 Desa Pulau Sipan, kemudian mencoba mendalami ilmu agama dengan bahasan kitab kuning pada pesantren Salafiyah Surau Batu Desa Punggung Lading – Padang Pariaman selama 2 tahun,.

Kemudian masuk pendidikan formal Kembali di Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Bukittinggi. Selanjutnya masuk Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari`ah dan Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru selama 10 Semester dengan meraih Gelar SARJANA HUKUM ISLAM (S.HI).

Selama menjadi mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah (Pidana dan Politik Islam), Beliau aktif dibelbagai kegiatan dan organisasi, diantaranya adalah Beliau menjabat Sebagai Ketua Umum Badan Pemerintahan Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah (BPMJ-JS), Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC. IPNU) Kota Pekanbaru Periode 2008-2010. Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Inuman (FORKOMIN) Pekanbaru. Wakil Sekretaris LSM Sahabat Alam Sumatera (S.AS) Provinsi Riau. Pengurus LSM Peduli SDM Provinsi Riau. Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Pekanbaru. Sekretaris PAC Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Kecamatan Sukajadi. Kemudian sebagai perwujudan dari ilmu politik yang didapat di bangku kuliah beliau juga pernah ikut dalam bursa pencalonan Legislatif pemilu 2009 dari Partai PKNU Nomor Urut 3.

Daerah Pemilihan I Kota Pekanbaru (Kec. Sukajadi, Pekanbaru Kota, Senapelan, Limapuluh dan Sail).

Adapun Karya-Karya Beliau Yaitu : Penelitian Skripsi ***“Pesepsi Aktivis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Suska Riau Terhadap Demonstrasi Dalam Menyampaikan Pendapat Menurut Persfektif Fiqh Siyasah”***. Untuk Opini Riau Pos ***“ Keinginan Kaum Muda Dalam Mengisi Kemerdekaan RI ”, “Reformasi Birokrasi “ dan Rekrutmen Politik Pileg 2009”***.

Prinsip Hidup : Hidup Untuk Pengabdian. Sedikit Bicara Banyak Berbuat.